

**MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR EKONOMI**  
**Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos) dalam Bidang Ilmu Politik



**Oleh:**

**CHAIRUNNISA**

**NIM: I01219009**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

**PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chairunnisa

NIM : 101219009

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : **MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR  
EKONOMI Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah  
Kota Surabaya**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 9 Januari 2023

Yang Menyatakan



Chairunnisa  
NIM.101219009

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Chairunnisa

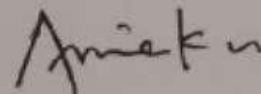
NIM : I01219009

Program Studi : Ilmu Politik

Yang Berjudul : **“MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR EKONOMI Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya”** saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing



**Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si**

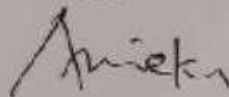
**NIP : 196909071994032001**

## PENGESAHAN

Skripsi oleh Chairunnisa dengan judul: "MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR EKONOMI Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya" telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 11 Januari 2023.

## TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. Hj. Amiek Nurhayati, M.Si  
NIP. 196909071994032001

Penguji II



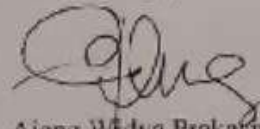
Holilah, S.A.G. M.Si  
NIP. 197610182008012008

Penguji III



Noor Rohman, M.A  
NIP. 198510192015031001

Penguji IV



Ajeng Widya Prakaita, M.A  
NIP. 199502232020122025

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Dr. Md. Chalik, M.Ag  
NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chairunnisa  
NIM : I01219009  
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Politik  
E-mail address : i01219009@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR EKONOMI**

**Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya**

.....  
.....  
.....  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Penulis

( Chairunnisa )

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Konseptual.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIK</b> .....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori .....	19
a. Politik Pembangunan .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	31
A. Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Pemilihan Subyek Penelitian .....	33
D. Tahap-Tahap Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	39
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	41

H. Sistematika Pembahasan.....	41
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISA .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya .....	43
B. Politik Pembangunan Eri Cahyadi Untuk Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya .....	51
a. Aktor Politik Pembangunan .....	52
b. Isu Politik Pembangunan.....	57
c. Strategi Politik Pembangunan .....	61
d. Hasil Politik Pembangunan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>

### DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian .....	34
--	----

### DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Data Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya .....	49
Gambar 4.2. Data Sentra UMKM Kota Surabaya .....	50
Gambar 4.3. Data Jumlah UMKM Kota Surabaya .....	70

## ABSTRACT

**Chairunnisa, 2023.** *TREATING POWER BASED ON THE ECONOMIC SECTOR Surabaya City Government UMKM Empowerment Strategy*, Thesis for the Political Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Keywords:** Development Politics, Post Electoral, UMKM Empowerment

This research started with Eri Cahyadi who made the economic sector the foundation for the post-electoral development of the City of Surabaya, which was different from previous leaders who emphasized development in the infrastructure sector. Therefore, the formulation of the problem in this study is how is the political development carried out by Eri Cahyadi in empowering UMKM in the city of Surabaya. This study aims to analyze the politics of development carried out by Eri Cahyadi in empowering UMKM in the city of Surabaya.

This study uses a qualitative research approach with a case study type of research. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation from several books, scientific works relevant to this research. The selected informants are members of DPRD, Service, Political Parties, Society and academics. This study uses the political theory of development put forward by Warjio. The results of this study are that the UMKM empowerment program has provided guidance to micro business actors with a total of 5544, and the UMKM empowerment program has an impact on economic development in the city of Surabaya.



## ABSTRAK

**Chairunnisa, 2023.** MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR EKONOMI Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

**Kata Kunci:** *Politik Pembangunan, Pasca Elektoral, Pemberdayaan UMKM*

Penelitian ini berawal dari Eri Cahyadi yang menjadikan sektor ekonomi sebagai tumpuan pembangunan Kota Surabaya pasca elektoral, yang dimana hal tersebut berbeda dengan pemimpin sebelumnya yang menekankan pembangunan pada bidang infrastruktur. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana politik pembangunan yang dilakukan Eri Cahyadi dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik pembangunan yang dilakukan Eri Cahyadi dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dari beberapa buku, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Informan yang dipilih yaitu anggota DPRD, Dinas, Partai Politik, Masyarakat dan akademisi. Penelitian ini menggunakan teori politik pembangunan yang dikemukakan oleh Warjio. Adapun Hasil dari penelitian ini adalah program pemberdayaan UMKM telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dengan jumlah 5544, serta program pemberdayaan UMKM berdampak terhadap pembangunan ekonomi dimana Kota Surabaya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tahun 2020 Kota Surabaya kembali melakukan Pemilihan Walikota. Hasil rekapitulasi suara KPU kota Surabaya pasangan Eri Cahyadi-Armudji yang diusung oleh PDIP dan PSI mendapatkan suara lebih unggul. Strategi kemenangan yang digunakan oleh pasangan Eri-Armuji, yaitu dengan menggunakan dukungan partai PDIP yang di mana partai tersebut merupakan partai besar di Kota Surabaya, serta dukungan dari Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya yang sangat disayangi oleh warga Kota Surabaya dan dianggap sukses dalam memimpin kota Surabaya. Sehingga, membuat warga Kota Surabaya beranggapan bahwa calon yang diusung oleh Risma tidak jauh berbeda dengan kinerja Risma.<sup>1</sup>

Adapun program yang dimiliki oleh Eri Cahyadi berbeda dengan Tri Rismaharini, dimana pada penjelasan sebelumnya program kerja yang dilakukan oleh Risma lebih condong kepada sektor lingkungan hidup sedangkan kalau Eri sendiri condong pada perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dari Misi yang disampaikan pada saat kampanye, dimana 3 dari 10 Misi tersebut mengenai sektor perekonomian tersebut, yaitu: Pertama, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian ekonomi lokal. Kedua, memperkuat daya saing Surabaya

---

<sup>1</sup> Sholihatus Ulfa and Warsono, "Strategi Calon Walikota Surabaya 2020 Eri Cahyadi Dan Armuji Dalam Memenangkan Pilwali Di Surabaya," *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 10, no. 3 (2022): 497.

sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional. Ketiga, menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya.<sup>2</sup>

Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk sebesar 3.016.653 jiwa pada tahun 2016 (Surabaya dalam Angka, 2018), sebagai kota terbesar kedua Surabaya tentu mempunyai permasalahan ekonomi mulai dari kemiskinan, penurunan daya beli, inflasi, bahkan kriminal.<sup>3</sup> Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait grafik Kota Surabaya di tahun 2020 menyebutkan bahwa grafik pertumbuhan ekonomi di Surabaya mengalami kontraksi di angka -4,85 persen. Sedangkan pengangguran terbuka di Surabaya, pada tahun 2020 di angka 9,79 persen. Kemudian, persentase kemiskinan di tahun 2020 tercatat 5,02 persen dari tahun sebelumnya 4,51 persen.<sup>4</sup>

Ditinjau dari aspek peran dan pelayanan pemerintah dibidang ekonomi, selama produk-produk unggulan daerah masih mengalami hambatan dibidang pemasaran, permodalan, pemanfaatan teknologi dan informasi, sehingga kerjasama ekonomi antar wilayah maupun antar pelaku ekonomi lokal belum menunjukkan sinergisitas, akibatnya banyak produk-produk unggulan Kota Surabaya yang belum dikenal.<sup>5</sup> Oleh karena itu

---

<sup>2</sup> Muhammad Rizky Rahmanda, "Strategi Digital Marketing Politik Tim Sukses Eri" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>3</sup> Mohammad Wahed, "Pemetaan Potensi Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2020): 62.

<sup>4</sup> <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pertumbuhan-ekonomi-di-surabaya-alami-kontraksi-di-angka-4-85-persen>, diakses pada 5 Desember 2022.

<sup>5</sup> Nurullaili Mauliddah, "Disparitas Pendapatan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 22, no. 1 (2020): 326.

pembangunan ekonomi saat ini harus di prioritaskan pada potensi sektor ekonomi yang dimiliki oleh kota surabaya serta perumusan kebijakan guna menekan tingkat pengangguran yang ada di kota surabaya.

Pembangunan ekonomi dibutuhkan dalam sebuah negara untuk meningkatkan pendapatan perkapita sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut Amalia, pembangunan ekonomi memiliki bertujuan untuk meningkatkan Gross National Product (GNP) sehingga dapat memberantas kemiskinan, peningkatan pendapatan, tersedianya lapangan kerja yang memadai, pendidikan dengan baik, peningkatan standar kesehatan, perbaikan kondisi lingkungan hidup, dan lain-lain.<sup>6</sup>Pembangunan ekonomi menjadi penyokong utama keberhasilan suatu negara.<sup>7</sup>

Melihat banyaknya UMKM di Surabaya, yaitu sebanyak 60.007 UMKM,<sup>8</sup> maka salah satu upaya pembangunan ekonomi di Surabaya dapat dilakukan melalui pemberdayaan UMKM. Menurut Rahayu, UMKM adalah usaha yang mampu memperbanyak lapangan kerja, dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi, dan ikut serta dalam mewujudkan stabilitas nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Moh Muqorrobin and Ady Soejoto, "Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 3 (2017): 6.

<sup>7</sup> Nanik Istiyani Selly Febriana, Herman Cahyo Diartho, "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 60.

<sup>8</sup> <https://www.surabaya.go.id/id/berita/60749/umkm-surabaya-capai-60-ribu-leb>

<sup>9</sup> Alifah Fidela, Aprinaldi Pratama, and Tita Nursyamsiah, "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya Di Desa Jambu , Kabupaten Sumedang," *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 2, no. 3 (2020): 494.

UMKM mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan nasional karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja, meratakan pendapatan, membangun ekonomi pedesaan, meningkatkan ekspor nonmigas, serta meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Anggraeni, UMKM adalah usaha yang dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998, dimana pada saat itu UMKM dapat menjadi penyelamat dalam memulihkan ekonomi bangsa karena dapat menyumbang PDB dan menyerap tenaga kerja.<sup>10</sup> UMKM berkontribusi sekitar 87% dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan 85% dalam penyerapan tenaga kerja, maka dari itu UMKM mempunyai peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>11</sup>

Namun dalam perkembangannya UMKM ternyata bukanlah sektor usaha yang terbebas dari masalah, banyak sekali masalah yang dihadapi dan perlu perhatian dan penanganan serius. Permasalahan terdapat pada UMKM diantaranya, yaitu: Kurangnya modal kerja, rendahnya sumberdaya manusia, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut laporan BPS, Dibyو Prabowo menegaskan bahwa 35.10% UKM mengalami kesulitan dalam permodalan, kepastian pasar 25.9% dan kesulitan bahan baku 15.4%.<sup>12</sup> Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya kreativitas dan inovasi, kurang mampu membaca peluang yang

---

<sup>10</sup> Alifah Fidela, 494.

<sup>11</sup> Moh. Muklis Sulaeman, "Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan," *Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat 2*, no. 01 (2019): 17.

<sup>12</sup> Alifah Fidela, 494.

ada, kurangnya strategi pemasaran. Kurangnya sistem jaringan juga menjadi masalah pokok, karena sebegus apapun kualitas produk yang dihasilkan, jika kurang dalam promosi maka hal tersebut membuat produk tidak dapat bersaing pasaran.<sup>13</sup>

Melihat pentingnya peran UMKM dalam perekonomian dan banyaknya UMKM yang ada di Kota Surabaya, maka sudah seharusnya pemerintah mulai memperhatikan UMKM. Komitmen pemerintah terhadap UMKM dapat menjadi penguatan UMKM dalam perkembangannya, sehingga diharapkan dapat menaikkan iklim investasi dan menaikkan keinginan usaha.<sup>14</sup> Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses memperluas jaringan pemasarannya dan dalam hal jaminan permodalan.<sup>15</sup> Terlebih lagi pemerintah Kota Surabaya dengan kepemimpinan yang baru, masyarakat Surabaya tentu berhadap bahwa pemerintah Kota Surabaya bisa lebih baik lagi, serta memiliki keperdulian terhadap masyarakat dan UMKM tentunya.<sup>16</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>13</sup> Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, "UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa," *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 143.

<sup>14</sup> Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, 141.

<sup>15</sup> Sudati Sarfiah, Hanung Atmaja, and Dian Verawati, 144.

<sup>16</sup> Elis Yusniyawati and Redi Panuju, "Karakteristik Ekspektasi Generasi Milenial Calon Walikota Surabaya 2020-2025: Peduli Dan Merakyat," *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2020): 17.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Bagaimana politik pembangunan yang dilakukan Eri Cahyadi dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk menganalisis politik pembangunan yang dilakukan Eri Cahyadi dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat akademis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu, peneliti dapat berkontribusi dalam perkembangan Ilmu Politik khususnya yang berkaitan mengenai analisa politik pembangunan. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya, serta dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa jurusan ilmu politik pada umumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, yaitu dapat memberikan saran kepada pihak terkait, khususnya Pemerintah Kota Surabaya mengenai politik pembangunan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam melakukan pembangunan melalui sektor ekonomi dimasa yang akan

datang. Serta Penelitian ini digunakan untuk menempuh gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Politik Pembangunan**

Politik pembangunan adalah strategi atau model yang digunakan dalam pembangunan.<sup>17</sup> Politik pembangunan dikenal sebagai sebuah sudut pandang yang digunakan untuk menganalisis pembangunan dari sudut politik. Politik pembangunan adalah konsep yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan bagaimana cara-cara (politik) yang digunakan dalam konteks pembangunan untuk mencapai tujuannya. Cara tersebut dapat dilakukan oleh negara, institusi/organisasi ataupun partai politik.<sup>18</sup> Adapun politik pembangunan dalam penelitian ini adalah politik pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya untuk merawat kuasa.

### **2. Pasca Elektoral**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pasca adalah sesudah. Sedangkan elektoral sendiri yang biasa dikenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah salah satu

---

<sup>17</sup> Heri Kusmanto and Warjio Warjio, "Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Indonesia – Malaysia," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 184.

<sup>18</sup> Burhanuddin Siregar, Heri Kusmanto, and Warjio Warjio, "Politik Pembangunan Organisasi Himpunan Keluarga Besar Mandailing 'HIKMA' Di Sumatera Utara," *Perspektif* 9, no. 2 (2020): 286.



cara untuk menentukan wakil rakyat atau orang-orang yang akan menjalankan pemerintahan.<sup>19</sup> Menurut Ramlan Surbakti Pemilu merupakan waktu dimana rakyat dapat ikut serta dalam proses politik yang terjadi di sebuah pemerintahan.<sup>20</sup> Pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat, seperti: Bupati/wali kota, Gubernur dan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota.<sup>21</sup> Adapun Pemilihan Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemilihan Wali Kota Surabaya tahun 2020. Maka pasca elektoral yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan atau situasi politik yang terjadi dalam pemerintah Kota Surabaya sesudah terjadinya Pemilihan Wali Kota tahun 2020.

### 3. Strategi

Menurut Pearce, strategi adalah rencana masa depan yang digunakan untuk mencapai tujuan.<sup>22</sup> Menurut bussines dictionary, strategi merupakan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Henry Mintzberg, terdapat lima pengertian

---

<sup>19</sup>Awaluddin - Awaluddin, "Mengapa Pendidikan Politik Elektoral Penting? Respon Penyelenggaraan Pemilu 2019," *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 112.

<sup>20</sup>Achmad Mahargya Ridhaning Gusti And Program, "Perilaku Pemilih Pemula Dalam Merespon Wacana Risma Effect Pada Pilkada Surabaya 2020," *Jurnal Template* 10, no. 1 (2021): 2.

<sup>21</sup>Ja'far Shodiq, "Persinggungan Konsep Pemilu Di Indonesia Dengan Pemikiran Politik Dalam Islam," *Ekp* 9, no. 2 (2021): 41.

<sup>22</sup> Ita Hartati, "Strategi Pembangunan Sdm Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi 4.0," *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 114.

strategi, yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, strategi sebagai taktik, dan strategi sebagai perpesktif. Berdasarkan penjelasan di atas, strategi mempunyai tujuan dalam mempengaruhi keadaan di masa depan, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan berbagai cara yang telah direncanakan.<sup>23</sup> Adapun strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam pemberdayaan UMKM.

#### **4. Pemberdayaan UMKM**

Adi Fahrudin menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM adalah usaha yang dilakukan untuk membantu badan usaha perseorangan sesuai dengan kriteria usaha kecil yang sudah dijelaskan dalam undang-undang. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi UMKM agar dapat berkembang dan berkompetisi dengan sehat. Dengan adanya pemberdayaan, UMKM diharapkan dapat berkembang dengan optimal dalam memanfaatkan peluang serta dapat mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada. Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014, mendefinisikan pemberdayaan adalah usaha yang digunakan untuk meningkatkan

---

<sup>23</sup> Eris Juliansyah, "Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Ekonomak* 3, no. 2 (2017): 19.

kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang dibuat.<sup>24</sup> Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Surabaya.

## 5. Pemerintah Kota Surabaya

Pembentukan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan pada UU Nomor 16 Tahun 1950, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang berdasarkan pada prinsip otonomi seluas-luasnya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Penyelenggaran Pemerintahan Kota Surabaya dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.<sup>25</sup> Pemerintah Kota Surabaya saat ini dipimpin oleh seorang Walikota yang bernama Eri Cahyadi, bersama Wakilnya yang bernama Armuji.

---

<sup>24</sup> Nurdina et al., "Strategi Pemberdayaan UMKM Makanan Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Kedamean Gresik," *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 46.

<sup>25</sup> Laporan Kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan judul penelitian yang mengkaji mengenai politik pembangunan, maka topik penelitian terdahulu yang penulis gunakan tidak jauh berbeda dengan judul, yaitu mengenai politik dan pembangunan. Sebelumnya penulis akan membahas mengenai politik terlebih dahulu, jika perbicara mengenai politik lebih tepatnya politik lokal maka penelitian terdahulu mayoritas akan membahas mengenai cara pemenangan pada saat pemilihan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Fitri Aprillia Fokatea dan Wawan Mas'udi dalam judul "*Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula*",<sup>26</sup> menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada tingkat lokal sering kali terjadi fenomena "estafet kekuasaan". Hal tersebut biasanya terjadi akibat adanya hubungan kekerabata, dimana sang kakak mengusulkan adiknya untuk meneruskan jabatannya. Adapun cara yang dipakai untuk meneruskan kekuasaan dimulai dari penguasaan internal partai politik, berlanjut dengan menguasai sistem dalam birokrasi, sehingga pada akhirnya dapat dengan mudah membuat kendali kebijakan dan bisa merebut simpati masyarakat.

---

<sup>26</sup> Fitri Aprillia Fokatea and Wawan Mas'udi, "Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus Di Kabupaten Kepulauan Sula," *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020).

Penelitian dari Bai Rahmat yang berjudul *“Elite Penentu Dalam Politik Lokal ( Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014) ”*,<sup>27</sup> berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, menjelaskan bahwa pemilihan umum dapat didukung oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, profesi serta elit politik. Salah satu elit yang biasanya banyak terkenal ditingkat lokal adalah ulama yang berada di pondok pesantren, yang kerap menjadi sasaran para politisi untuk mendapatkan dukungan politik. Peran ulama dalam kemenangan calon politisi dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung, adapun cara langsung dilakukan ulama dengan cara mempengaruhi para santri dalam pemilihan, sedangkan cara tidak langsung dilakukan dalam bentuk acara seperti pengajian yang ada dilakukan di masyarakat.

Selain berperan dalam kemenangan electoral, elit politik juga berperan dalam tingkat partisipasi pemilih seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang berjudul *“Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 ”*, karya Muhammad Fadli , dkk.<sup>28</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Selain peran penyelenggara Pilkada dalam melakukan sosialisasi, juga karena adanya dukungan dari pihak lain, yakni peran elit lokal. Elit lokal ikut

---

<sup>27</sup> Bai Rahmat, *“Elite Penentu Dalam Politik Lokal ( Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014),” Jom Fisip 4*, no. 2 (2017).

<sup>28</sup> Muhammad Fadli et al., *“Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015,” Aristo 6*, no. 2 (2018).

sertaan dalam mengajak masyarakat untuk menyelesaikan penyelenggaraan Pilkada. Elit lokal menjadi sosok yang penting dalam masyarakat karena mereka dapat diposisikan sebagai opinion leader, opinion leader sendiri mencakup elit politik, tokoh agama, dan tetua adat. Elit lokal memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga komunikasi yang dilakukan mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Elit lokal aktif melakukan kampanye serta dalam pelaksanaan kampanye para elit politik memainkan peran sebagai panutan atau acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Keterlibatan elit lokal mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, walaupun bukan hanya peran dari elit lokal yang menjadi satu-satunya yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Akan tetapi peran mereka sangat efektif dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada sehingga meningkatkan partisipasi pemilih.

Selesteah berbicara mengenai politik khususnya politik ditingkat lokal, maka selanjutnya penelitian terdahulu akan membahas mengenai pembangunan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Abd Hannan dan Fithriyah Rahmawati, dengan judul “*Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal*”,<sup>29</sup> yang menjelaskan bahwa pembangunan merupakan salah satu isu sosial yang mengundang banyak perhatian. Berbagai gagasan pembangunan bermunculan,

---

<sup>29</sup> Abd. Hannan and Fithriyah Rahmawati, “Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Pamekasan Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal,” *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020).

salah satunya adalah gagasan pembangunan berkelanjutan. Gagasan pembangunan berkelanjutan kemudian dimodifikasi melalui instrumen pembangunan berlandaskan nilai lokalitas, atau yang biasa kita kenal sebagai pembangunan berkearifan lokal, yang didasarkan pada potensi kearifan lokal. Pembangunan yang memanfaatkan potensi kearifan lokal salah satunya dapat dilakukan melalui sektor pariwisata.

Selain sektor pariwisata pembangunan juga dapat dilakukan melalui sumber daya manusia, seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang berjudul “*Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa*”, yang dilakukan oleh Hayat, dkk,<sup>30</sup> di dalam penelitian itu dijelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) diatur dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa. Peraturan tersebut biasanya digunakan sebagai pedoman aparat desa untuk melaksanakan pembangunan sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan sumber daya manusia di perdesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan dalam pembangunan sumber daya manusia, yaitu: meningkatkan kualitas pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, memberdayakan ibu-ibu PKK dan Karangtaruna untuk membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat, pemberian insentif terhadap guru TK, PAUD, dan Taman Posiyandu,

---

<sup>30</sup> Slamet Hayat Hidayat Turohman and Yaqub Cikusin, “Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 8, no. 2 (2018).

memberdayakan ulama masyarakat Desa untuk menjadi guru dalam kegiatan pendidikan Madrasah Diniyah.

Selanjutnya ada pembangunan Desa yang mana dijelaskan dalam penelitian berjudul "*Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur*", yang dilakukan oleh bejudul Irma Fitriana Ulfah, dkk.<sup>31</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kewenangan dalam bidang pembangunan desa tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan pengembangan potensi lokal desa, seperti: agrowisata. Potensi agriowisata memberikan manfaat dan dampak kepada pemilik lahan, pemerintah desa dan warga sekitar. Pembangunan agrowisata bertumpu dalam sumber daya alam yakni produksi dari ladang dan sawah. Pembangunan agrowisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan tenaga kerja, sehingga kesejahteraan warga bisa meningkat.

Setelah pembahasan mengenai politik dan pembangunan yang dibahas secara terpisah, maka penelitian terdahulu yang selanjutnya akan membahas mengenai politik pembangunan itu sendiri. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul "*Pengaruh Politik Pembangunan terhadap Kesejahteraan Masyarakat*", karya Helmi Dwi Agung Pambudi dan Nia Kurniasari,<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Irma Fitriana Ulfah, Andi Setiawan, and Alfiyatur Rahmawati, "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata Di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (2017).

<sup>32</sup> Helmi Dwi Agung Pambudi and Nia Kurniasari, "Pengaruh Politik Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota* 1, no. 2 (2021).



penelitian tersebut menjelaskan Pembangunan dapat dikatakan sebagai upaya untuk merealisasikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Namun dalam upaya tersebut, seringkali terdapat suatu paradoks pembangunan seperti ketergantungan wilayah periphery terhadap wilayah central. Dalam pelaksanaan pembangunan, terdapat para aktor yang menjalankan aktivitas politik (saling mempengaruhi satu sama lain berdasarkan kinerja) dalam pembangunan. Menurut Teori Maslow terdapat tiga kelompok aktor yang saling mempengaruhi didalamnya yaitu Pemerintah selaku pemegang kebijakan, kemudian masyarakat yang dijadikan sebagai perspektif tujuan pembangunan, dan Swasta sebagai aktor penunjang dalam pembangunan. Apabila ketiga kelompok tersebut terlibat aktif dalam kegiatan politik pembangunan, maka pembangunan tersebut akan mencapai tujuan intinya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian yang berjudul "*Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang*", karya Mau Lida Ulfa, dkk,<sup>33</sup> menjelaskan bahwa dalam politik pembangunan para aktor harus saling bersinergi agar sasaran pembangunan yang dituju dapat tercapai, serta harus mampu melihat peluang dan mengatasi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, penting bagi para aktor yang terlibat untuk menggunakan strategi pendekatan yang tepat. Adapun, aktor politik pembangunan yang terlibat bisa terdiri dari tingkat nasional hingga lokal.

---

<sup>33</sup> Mau Lida Ulfa, Heri Kusmanto, and Warjio Warjio, "Politik Pembangunan Wisata Halal Di Kota Sabang," *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal* 9, no. 1 (2019).

Strategi politik pembangunan yang dirumuskan oleh aktor kemudian regulasinya diturunkan ke tingkat lokal.

Penelitian dengan judul “*Politik Pembangunan Di Kota Palangka Raya Menuju Smart City Kota Palangka Raya*”, karya Puput Ratnasari juga membahas mengenai aktor dalam politik pembangunan.<sup>34</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa aktor politik pembangunan itu adalah kota itu sendiri, sehingga sangatlah banyak dan luas bidang-bidang keahliannya sebagai, bukan saja mewewakili lapisan tengah tetapi juga mewakili lapisan bawah juga dalam struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, dari banyak lapisan stratifikasi dan keahlian aktor politik pembangunan yang dapat di kelompokkan dalam empat jenis, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat sipil dan individu – individu yang berada di Kota itu sendiri.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Politik Pembangunan Di Perdesaan*”, karya Febrianto Wisnu Wardhana,<sup>35</sup> penelitian tersebut menjelaskan mengenai politik pembangunan ditingkat desa. Politik pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari peran elit desa. Kelompok-kelompok elit tersebut bersifat sangat heterogen, mereka terdapat dalam komunitas agama, politik, ekonomi, adat, dan sebagainya, contoh dari elit adalah kepala desa. Pada proses pembangunan desa, peran kepala desa juga sangat besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran kepala desa demikian besar, yaitu pertama, kepala desa di kebanyakan desa mempunyai wewenang yang betul-betul nyata. Kedua,

---

<sup>34</sup> Puput Ratnasari, “Politik Pembangunan Di Kota Palangkaraya Menuju Smart City Kota Palangkaraya,” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 12 (2020).

<sup>35</sup> Febrianto Wisnu Wardhana, “Politik Pembangunan Di Perdesaan,” *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 15, no. 1 (2017).

kepala desa mempunyai posisi yang kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Dengan peran politik yang besar itu, Kepala Desa memegang kunci dalam pengambilan keputusan. Inilah yang kemudian menjadikan Kepala Desa Batu Gajah terkadang dapat diposisikan sebagai mediator pengambilan keputusan, sebagai motivator dalam pembangunan, dan sebagai fasilitator pembangunan. Peranan politik yang besar ini jika tidak dipegang oleh Kepala Desa yang berkompeten, besar kemungkinan akan terjadi penyelewengan kekuasaan.

Dari penelitian terdahulu yang sudah di jelaskan di atas tentu terdapat adanya persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Jika penelitian terdahulu membahas mengenai politik lokal, penelitian ini juga membahas mengenai politik lokal, namun perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu membahas politik lokal yang berkaitan dengan pemilihan atau strategi pemilihan, maka penelitian yang dilakukan penulis ini membahas mengenai politik lokal yang terjadi setelah pemilihan. Penelitian terdahulu membahas mengenai pembangunan sama halnya dengan penelitian ini juga membahas mengenai pembangunan, adapun perbedaannya adalah penelitian ini membahas pembangunan dari segi politik sedangkan penelitian terdahulu tidak. Lalu pada penelitian terdahulu juga membahas mengenai aktor dalam politik pembangunan sama halnya dengan penelitian ini, namun perbedaannya objek, lokasi, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian terbaru.

## B. Kajian Teori

### a. Politik Pembangunan

Ilmu politik menurut Laswell adalah ilmu tentang kekuasaan. “*when we speak of the science of politics, we mean the science of power.*” Dalam terbarunya Laswell menggunakan istilah “*influence*” serta mengartikan ilmu politik sebagai “*....the study of influence and the influential...are those who get the most of what there is to get.*”. Adapun yang diperoleh disini dapat berupa kehormatan, penghasilan, keselamatan, dan yang memperoleh adalah golongan elit dan bukan rakyat biasa.<sup>36</sup> Laswell berpendapat, bahwa politik merupakan suatu proses yang berbentuk “siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (politics as who gets, what, when, and how).<sup>37</sup> *Who*, adalah aktor politik dalam suatu negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam politik, dapat berupa individu atau kelompok dalam institusi. *Get what*, sesuatu yang diperjuangkan oleh aktor dan dapat berupa kekuasaan. *When*, waktu yang digunakan oleh aktor untuk mendapatkan kekuasaan. *How*, kekuasaan yang didapatkan tersebut dilakukan dengan aturan main yang sudah disepakati dalam sistem politik dengan dipayungi oleh undang-undang dan ketentuan peraturan lainnya.<sup>38</sup>

Penjelasan mengenai konsep politik dan pembangunan, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep tersebut mempunyai makna yang saling

---

<sup>36</sup> Abd Rasyid, *Politik Sosial Dan Kepemimpinan Wanita* (Ponorogo: Wade Group, 2017).

<sup>37</sup> Islamiyati Islamiyati and Dewi Hendrawati, “Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya,” *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 106.

<sup>38</sup> Andrik Purwasito, *Pengantar Studi Politik* (Surakarta: UNS Press, 2011).

hubungan. Jika keduanya disatukan menjadi politik pembangunan maka bukan hanya saling terkait tetapi mempunyai suatu paradigma baru. Konsep politik pembangunan secara filosofis merupakan sebuah konsep lebih mendalam untuk memahami realitas politik dalam pembangunan. Singkatnya, kalau pembangunan diibaratkan sebuah kue yang diperebutkan oleh orang banyak, maka politik pembangunanlah yang menjadi “kunci” bagaimana kue tersebut dapat diraih, dibagikan atau dikreasikan sehingga mereka dapat terus menikmati. Moeljarto berpendapat bahwa politik pembangunan adalah cara yang digunakan dalam memperoleh tujuan pembangunan.<sup>39</sup>

Zulfi Syarif Koto mendefinisikan politik pembangunan sebagai sebuah cara atau strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan transformasi sosial ke arah yang lebih baik yang berlandaskan pada nilai-nilai yang digunakan dalam suatu negara. Dengan demikian menurut Warjio, politik pembangunan bukan hanya menjelaskan mengenai cara atau strategi yang ingin dicapai dalam pembangunan, akan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang terdapat dalam pembangunan, strategi dan cara yang digunakan tersebut melibatkan banyak kelompok kepentingan. Warjio mendefinisikan politik pembangunan sebagai satu upaya yang digunakan oleh para aktor seperti individu atau kelompok/negara baik lokal maupun internasional, dengan cara terstruktur atau tidak dalam pembangunan, proses-proses politik yang dilakukan untuk

---

<sup>39</sup> Warjio, *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, Dan Ideologi* (Jakarta: Kencana, 2016).

melegitimasi program atau tujuan pembangunan agar pembangunan tersebut bisa memperkuat atau mendapat dukungan sehingga kekuasaan dapat terus dipegang dengan cara atau strategi-strategi tertentu. Politik pembangunan dapat dilakukan oleh aktor negara ataupun non negara baik dari dalam ataupun luar negeri.<sup>40</sup>

Politik pembangunan tidak hanya menjelaskan latar belakang pembangunan, akan tetapi juga menjelaskan proses yang terjadi dalam sebuah pembangunan, mulai dari aktor atau kelompok kepentingan yang terlibat, idea atau paham apa yang digunakan dalam pembangunan. Di dalam politik pembangunan mengandung ide-ide, pemikiran atau gagasan dari aktor pembangunan yang ingin mendapatkan keuntungan dari pembangunan. Warjio mengasumsikan bahwa siapa yang terlibat dalam pembangunan. Apakah seorang individu, kelompok atau bahkan negara dan internasional. Melalui strategi dan cara yang dilakukan, apa yang ingin didapatkan dari pembangunan. Maka Warjio menegaskan beberapa hal dalam politik pembangunan terkait pertanyaan mengenai: Siapa (*who*), apa (*what*), bagaimana (*how*) dan mendapat apa (*get what*). Siapa disini berhubungan dengan setiap individu, kelompok atau lembaga/negara yang secara lahiriah adalah insan politik, dan mereka disebut sebagai aktor-aktor politik pembangunan. Apa, hal ini berhubungan dengan isu atau topik tertentu yang berkaitan dengan politik pembangunan, hal ini yang tentu akan menjadi fokus penelitian dalam bidang politik pembangunan. Bagaimana,

---

<sup>40</sup> Warjio, 106.

berhubungan dengan cara atau strategi yang digunakan oleh aktor dalam mendapatkan tujuan dari politik pembangunan. Mendapat apa, berkaitan dengan hasil yang ingin didapatkan dari politik pembangunan, hal tersebut bisa berupa jabatan, ekonomi atau kekayaan, konsesi-konsesi tertentu atau mungkin kekuasaan.<sup>41</sup>

Politik pembangunan tidak hadir dalam ruang kosong, namun sengaja dihadirkan oleh para aktor yang di mana aktor memiliki nilai atau ideologi. Politik pembangunan lahir dari aktor melalui proses dan kepentingan politik. Dengan perspektif kepentingan politik inilah aktor memainkan peran penting dan menjadi penentu bagaimana politik pembangunan dirumuskan, dijalankan sehingga dapat memberikan kepentingan kepada mereka ataupun kelompoknya, untuk waktu terdekat ataupun waktu jangka panjang baik secara ekonomi maupun politik dalam kaitannya dengan kekuasaan. Untuk meraihnya, mereka dapat melakukan dengan secara demokratis ataupun secara otoriter. Mereka berperan baik secara institusional ataupun noninstitusional. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka berusaha dan mencari dan kemudian memengaruhi ide, keputusan ataupun kebijakan dalam proses pembangunan yang dijalankan.<sup>42</sup>

Dalam politik pembangunan terdapat Variabel-variabel politik yang sangat menentukan bagaimana politik pembangunan dijalankan, dan berikut variabel-variabel politik pembangunan menurut Warji.<sup>43</sup>Pertama, Aktor

---

<sup>41</sup> Warjio, 111.

<sup>42</sup> Warjio, 108.

<sup>43</sup> Warjio, 141.

pembangunan yang memiliki peran utama dalam proses pembangunan, bisa berupa individu, kelompok, atau negara, dalam pembangunan ia memiliki strategi untuk mencapai kepentingan politik. Kedua, kekuasaan yang menjadi syarat penting dalam pembangunan, tanpa adanya kekuasaan sulit bagi aktor untuk mengintervensi pembangunan. Ketiga, sistem yang merupakan mekanisme yang dimiliki oleh aktor yang dapat menggerakkan sebuah pola pembangunan. Keempat, ideologi yang merupakan penggerak pembangunan karena di dalamnya terdapat cita-cita pembangunan. Kelima, Intervensi asing yang merupakan aktor diluar pembangunan yang mendukung rencana pembangunan yang dimainkan oleh aktor pembangunan dan mereka memiliki ketergantungan satu sama lain.

Selanjutnya Warjio menjelaskan empat macam basis analisis yang dapat digunakan dalam menganalisis politik pembangunan, berikut penjelasannya:<sup>44</sup> Pertama, Analisis Berbasis Pendekatan Ide (PI), dalam politik pembangunan Ide merupakan hal yang dasar yang dimiliki oleh aktor pembangunan. Menurut Gramsci, pembangunan sekarang merupakan bentuk hegemoni suatu kelompok kepada kelompok lain yang didasari oleh suatu ide. Menurut Gramsci, ide- kelompok berkuasa memainkan peran sangat besar dalam mencapai hegemoni kelompok. Dalam kaitan ini Gramsci menegaskan bahwa Ide dan opini tidak lahir secara spontan dalam benak tiap individu, keduanya mempunyai pusat formasi, iradiasi, persebaran, persuasi-sekelompok atau bahkan individu yang

---

<sup>44</sup> Warjio, 154



mengembangkan dan menghadirkan keduanya dalam bentuk realitas politik mutakhir. Di samping Gramsci, ilmuwan sosial yang sering digunakan pemikirannya untuk menganalisis pendekatan ide adalah Michel Foucault. Foucault membuat teori itu lebih sensitif terhadap relasi kekuasaan dan dominasi yang menyadarkan kita bagaimana relasi kekuasaan teranyam dalam semua aspek kehidupan, relasi kekuasaan terdapat dalam semua aspek kehidupan. Pikirannya tentang kekuasaan menyadarkan orang akan relasi kekuasaan antar-organisasi non-pemerintah dengan masyarakat. Dengan begitu pengetahuan mungkin bisa menjalankan tugas transformasi kalau kemudian pengetahuan membongkar dan menghentikan relasi kekuasaan.<sup>45</sup>

Kedua, Pendekatan Ekonomi Politik Internasional (EPI), Pendekatan ekonomi politik internasional didasarkan pada satu pemahaman paradigma pembangunan model Barat yang disebut sebagai “global setting”. Dalam konteks “global setting” ini kekuatan-kekuatan politik internasional memengaruhi ataupun mengintervensi kebijakan-kebijakan pembangunan suatu negara. Pendekatan kedua berusaha menelaah dampak aktor-aktor luar terhadap potensi demokrasi dan pembangunan. Aktor-aktor seperti itu bisa berujud: individu-individu yang menduduki posisi strategis (misalnya, Presiden suatu negara adidaya); organisasi internasional nonpemerintah (misalnya, Badan Keagamaan, Serikat Buruh, dan Amnesti

---

<sup>45</sup> Warjio, 158.

Internasional); lembaga finansial (misalnya, IMF dan Bank Dunia); dan organisasi Politik (misalnya, PBB).<sup>46</sup>

Ketiga, Pendekatan Sejarah Politik, Pendekatan politik pembangunan tidak hanya fokus pada masa kini tetapi juga menggunakan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah menjelaskan dari segi mana kajian sejarah hendak dilakukan, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkannya, dan lain sebagainya. Salah satu yang digunakan di dalam memahami sejarah adalah sejarah politik. Sejarah politik dalam politik pembangunan menjadi satu perspektif yang menekankan bagaimana kekuasaan-kekuasaan pada masa lalu baik yang dilakukan oleh negara, institusi ataupun individu melakukan pembangunan. Di sisi lain, kekuasaan yang ada sekarang ini lewat penguasa melegitimasi sejarah itu untuk kepentingan dan kesinambungan kebijakan pembangunan yang dijalankan. Aktor politik pembangunan akan menggunakan perspektif politik pembangunan untuk membenarkan kebijakan pembangunan yang dibuatnya dan seterusnya untuk kelangsungan kekuasaan yang dimilikinya melalui kebijakan pembangunan itu.<sup>47</sup>

Keempat, Analisis Berbasis Politik-Ekonomi-Moral (PEM), menurut Mohtar Masoed, pada umumnya analisis-analisis yang digunakan dalam menganalisis politik pembangunan ada tiga.<sup>48</sup> Analisis pertama

---

<sup>46</sup> Warjio, 159.

<sup>47</sup> Warjio, 150.

<sup>48</sup> Warjio, 161.

Politik sebagai Panglima (PSP), memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan negara yang diwakili oleh para birokratnya. Negara dipandang sebagai satu-satunya pelaku yang mampu melakukan intervensi ke dalam proses pembangunan ekonomi. Karena itu, pembangunan yang berhasil hanya mungkin kalau dijamin oleh negara yang kuat. Analisis kedua Ekonomi sebagai Panglima (ESP), lebih mengutamakan peranan pengusaha dan korporasi dalam proses pembangunan. Para aktor ini dibayangkan melakukan alokasi sumber daya dan pembuatan keputusan ekonomi lain berdasar pertimbangan pasar, yaitu mengikuti dinamika kekuatan permintaan dan penawaran. Analisis Ketiga moral sebagai panglima (MSP), pada analisis ketiga ini di kalangan cendekiawan dipandang masih lemah keberadaannya. Dalam analisis ini, ditegaskan bahwa cara paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Untuk itu wewenang pembuatan keputusan mengenai pembangunan, yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah harus dikembalikan kepada rakyat ataupun komunitas lokal.

Selanjutnya ada motif politik pembangunan adalah sebuah keinginan dari aktor bagaimana ia mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan pembangunan yang dijalankan, berikut motif pembangunan menurut Warjio:<sup>49</sup> Pertama, motif kekuasaan, dalam politik pembangunan motif kekuasaan berfungsi sebagai dorongan aktor pembangunan untuk

---

<sup>49</sup> Warji, 143.

mengendalikan orang atau kelompok lainnya dalam pembangunan sehingga tujuan dari pembangunan cepat tercapai. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh aktor sudah pasti berisi kekuasaan, dengan cara apa pun itu. Pencapaian ekonomi dari pembangunan suatu negara sebenarnya bermotifkan kekuasaan, jika ekonomi yang dijalankan oleh aktor membaik, maka aktor bisa terus didukung oleh masyarakat. Kedua, Motif Identitas, yang merupakan sesuatu yang melekat pada diri aktor untuk menunjukkan identitasnya agar identitasnya dapat diakui contoh: Di Malaysia, pada masa pemerintahan Idam Hadari identitas politik pembangunannya adalah Islam Hadari. Ketiga, motif aktualisasi, yang merupakan upaya untuk menggambarkan kemampuan, kejayaan, harga diri kepada publik, hal tersebut dapat berupa simbol ataupun bentuk bangunan, contoh: Bangunan piramida di Mesir.

Selanjutnya model politik pembangunan yang merupakan bagian penting dalam politik pembangunan, dengan model politik pembangunan dapat membantu dalam menganalisis politik pembangunan itu sendiri, adapun model politik pembangunan menurut warjio,<sup>50</sup> Pertama, model demokratik adalah model yang akan memberikan peluang partisipatif yang lebih luas. Model ini menggunakan prinsip-prinsip demokrasi, keterbukaan, kemudahan, akmoratik, akuntabilitas, sehingga partisipasi masyarakat dalam politik pembangunan menjadi sangat penting. Kedua, model otoriter, adalah model yang menekankan pada peran aktor secara

---

<sup>50</sup> Warjio, 173.

penuh, dengan kekuasaan yang dimilikinya, ia menguasai dan mengarahkan proses, arah, serta tujuan yang ingin dicapai dengan cara apa pun. Ketiga, model tradisional merupakan sebuah model yang di mana aktor politik pembangunannya berpusat pada tokoh-tokoh adat, kekuasaan untuk merumuskan pembangunan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur/tradisional. Keempat, model berbasis agama, merupakan model politik pembangunan yang menekankan pada nilai-nilai ataupun pada tuntutan agama, seperti Islam, Kristen, Hindu, ataupun Buddha. Dalam pembangunan agama bergungsi sebagai patokan berupa perintah, dan larangan dalam menjalankan pembangunan.

Selanjutnya ada strategi politik pembangunan yang berupa pendekatan dalam politik pembangunan. Pendekatan membantu untuk mengetahui apakah politik pembangunan yang dijalankan melibatkan kepentingan atas, kepentingan bawah atau campuran, adapun pendekatan politik pembangunan menurut Warjio, yaitu:<sup>51</sup>Pertama, pendekatan top-down merupakan pendekatan yang berpusat pada “aktor atas”, dalam merumuskan strategi pembangunan dikoordinasikan pimpinan tertinggi dan diturunkan pada level bawah. Mereka ini adalah penguasa; pemerintah, pendekatan ini biasanya menegaskan pentingnya peran pemerintah dan masyarakat biasanya dalam posisi yang lemah dalam berbagai aspek.

Kedua, pendekatan bottom-up, dalam pendekatan ini, rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat

---

<sup>51</sup> Warjio, 178.

sendiri, inisiatif strategi pembangunan berasal dari berbagai unit dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Ketiga, pendekatan campuran yang merupakan gabungan dari dua pendekatan sebelumnya. Dalam pendekatan ini terdapat kolaborasi antara aktor pembangunan di level atas (top-down) dengan aktor bawah (bottom-up). Biasanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (top-down) kemudian diminta masukan dari masyarakat baik, tujuannya agar program bisa berjalan dengan baik, pendekatan campuran sangat membuka ruang sinergisitas kerja dalam mencapai tujuan pembangunan.

Selanjutnya ada level analisis dalam kajian politik pembangunan dapat dilakukan berdasarkan levelnya, sehingga membantu kita untuk memudahkan mencari fokus kajian yang digunakan, dan berikut level analisis menurut Warjio, yaitu:<sup>52</sup> Pertama, level internasional dimana fokus kajian politik pembangunan berdasar pada isu-su internasional; peran mereka, ataupun strategi yang dijalankan. Kedua, level regional dimana kajian politik pembangunan berfokus pada satu wilayah tertentu. Latar belakang munculnya regionalisme adalah perasaan yang sama yang melibatkan beberapa negara dalam kawasan tertentu, adanya kedekatan wilayah di antara negara-negara, contoh: ASEAN.

Ketiga level nasional, fokus kajian dalam level ini adalah penekanan isu pembangunan pada satu negara tertentu, yang di mana negara menjadi kekuatan penentu dalam politik pembangunan, demikian juga peran kepala

---

<sup>52</sup> Warjio, 178.

negara dan organ-organ kenegaraan menjadi begitu penting dan berpengaruh. Keempat, level lokal yang berfokus pada isu-isu lokal dalam suatu negara atau wilayah yang diberikan otonomi politik untuk melaksanakan pembangunan. Kelima, level individu, dimana analisis kajian politik pembangunan dipusatkan pada peran aktor individu, strateginya, atau ideologi pemikiran politik pembangunannya, mereka berasal dari para teoretikus, akademisi, pimpinan negara, LSM, ataupun tokoh adat/agama maupun tokoh masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Melihat topik penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga dikenal sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan secara alamiah. Disebut metode kualitatif, karena data yang dihasilkan bersifat kualitatif dalam penelitian ini data yang disajikan berupa hasil wawancara dan beberapa dokumentasi pendukung. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam.<sup>53</sup> Penggunaan penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk mengungkap fenomena sosial dengan fakta-fakta yang ada, dalam penelitian ini fenomena sosial yang akan diteliti berupa bagaimana politik pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya pasca elektoral. Menurut Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>54</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif yang dimana dalam mengkaji sebuah kejadian atau aktivitas

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2013).

<sup>54</sup>Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, 2015.



dilakukan dengan lebih mendalam, studi kasus dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya.<sup>55</sup>

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi yang sesuai dengan judul yaitu MERAWAT KUASA BERTUMPU SEKTOR EKONOMI Strategi Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya, maka penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, partai politik Kota Surabaya, rumah pelaku UMKM, Sentra UMKM, serta perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena lokasi tersebut yang berkenaan langsung dengan dinamika politik pasca elektoral di Kota Surabaya serta tempat pelaksanaan program pemberdayaan UMKM Kota Surabaya.

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2022, Hal ini memakan waktu cukup lama karena terdapat beberapa kendala yaitu: Tempat penelitian yang beragam dan untuk melakukan wawancara harus menyesuaikan waktu dengan informan.

---

<sup>55</sup>Miftah Faridl Widhagdha and Suryo Ediyono, "Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia," *Journal of Social Responsibility Review* 1, no. 1 (2022): 72.

### C. Pemilihan Subyek Penelitian

Penentuan dalam pemilihan subyek peneliti yang menggunakan Teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan secara cermat, sehingga dapat memberikan data yang masif atau kuat dan komprehensif teliti terhadap fenomena yang ada dan dibutuhkan pada penelitian ini.<sup>56</sup> Dalam *purposive sampling* informan dipilih berdasarkan kriteria yang dipilih sebelumnya berdasarkan pertanyaan penelitian.

Adapun secara garis besar informan dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, pemerintah yang dimana dalam penelitian ini adalah DPRD Kota Surabaya dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, karena mereka adalah pengawas dan pelaksana program pemberdayaan UMKM. Kedua, partai politik yang mendukung Eri Cahyadi dalam Pilwali 2020 dan partai politik yang tidak mendukung Eri Cahyadi dalam Pilwali 2020, agar dapat mengetahui keadaan politik pasca elektoral di Kota Surabaya, dari banyaknya partai politik yang ada di Kota Surabaya penulis mengambil partai besar yang memiliki kursi di DPRD Kota Surabaya. Ketiga, masyarakat/pelaku UMKM yang ikut dalam program pemberdayaan UMKM, tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. Terakhir, akademisi sebagai triangulasi dalam penelitian ini. Berikut penjelasannya:

---

<sup>56</sup> H.Afifuddin, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 134.

**Tabel 3.1 Nama Informan Penelitian**

Nama	Jabatan
Luthfiah	Ketua komisi B DPRD Surabaya
Tatik Lely Juwita, S.E	Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya
Ratih Fibrina, S.E.	Staf Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya
Achmad Hidayat, S.Sos.	Wakil Sekretaris Bidang Program PDI Perjuangan Kota Surabaya.
Yuga Pratisabda Widyawasta, S.T.	Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya
Zainal Alim, M.Pd.I.	Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya
Drs. H. Musyafak Rouf, MH.	Ketua DPC PKB Kota Surabaya
Arif Fahrudin, ST.	Bendahara DPD PKS Kota Surabaya
Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD.	Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam
Holifah	Pelaku UMKM
Hasibah	Pelaku UMKM

Ainurrohma	Pelaku UMKM
------------	-------------

#### D. Tahap-Tahap Penelitian

Menurut Creswel, terdapat 6 tahapan khusus dalam penelitian kualitatif, yaitu:<sup>57</sup>

a) Pertama, dimulai dari mengidentifikasi masalah yang menjadi sasaran penelitian, hal tersebut berkaitan dengan jenis isu atau fenomena yang akan diteliti. Tahap ini dilakukan peneliti dengan mencari info di berbagai platform internet mulai dari google sampai instagram, dan pada waktu momennya Kota Surabaya baru saja melakukan pergantian kepemimpinan dari Tr Rismahari ke Eri Cahyadi. Kemudian penulis melihat bahwa banyak sekali program Eri Cahyadi yang berkenaan dengan sektor ekonomi, hal tersebut yang akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

b) Kedua, literature riview, dimana pada tahap ini peneliti harus mencari sumber bacaan yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Penulis melihat kebanyakan penelitian terdahulu membaha politik dan pembangunan secara terpisah. Adapun yang membahas mengenai politik pembangunan namun masih sedikit sekali dan belum ada

---

<sup>57</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021):40.

yang menggunakan obyek UMKM. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait politik pembangunan di sektor ekonomi.

- c) Ketiga, menentukan tujuan utama penelitian, adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah penulis ingin menganalisis politik pembangunan yang dilakukan Eri Cahyadi dalam pemberdayaan UMKM di Kota Surabaya.
- d) Keempat, pengumpulan data, pada tahap ini mengharuskan peneliti untuk menentukan objek atau partisipan yang akan digunakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan wawancara secara langsung dengan pemerintah, partai politik, masyarakat serta akademisi. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi ketempat pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, serta mengumpulkan beberapa dokumentasi pendukung dari informan.
- e) Kelima, analisis data, pada tahap ini peneliti melakukan analisis data sehingga mendapatkan gagasan atau teori baru. Data yang sudah dikumpulkan sebelumnya kemudian dianalisis dengan menggunakan teori politik pembangunan .
- f) Keenam, pelaporan; diaman pada tahap ini peneliti membuat laporan hasil penelitiannya. Pelaporan dilakukan dengan

cara presentasi dengan dosen juga pengumpulan hardfile dari penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada teknik pengumpulan data ini menjelaskan proses pencarian data hingga terkumpulnya data yang dibutuhkan. Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu:<sup>58</sup>

- a) Pertama, wawancara, yang bertujuan untuk mencatat opini, emosi, perasaan, dan hal lain berhubungan dengan individu. wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan data yang lebih banyak, sehingga peneliti dapat memahami kondisi sosial dan budaya informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan interview bersama, anggota DPRD Kota Surabaya sebagai pemerintah yang mengawasi program pemberdayaan UMKM, wawancara dilakukan di kantor DPRD Kota Surabaya, wawancara berjalan cukup lancar dan lama sekitar 90 menit. Kedua, penulis melakukan wawancara bersama DISKOPENRINDAG Kota Surabaya sebagai pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan UMKM, wawancara dilakukan sebanyak dua kali wawancara, karena pada wawancara yang pertama penulis tidak mendapatkan banyak data serta data yang didapatkan kurang sesuai, wawancara dilakukan secara

---

<sup>58</sup> Muhammad Rijal Fadli, 41.

bersama-sama dengan mahasiswa dari Universitas yang berbeda dengan penulis. Ketiga, penulis melakukan wawancara dengan lima partai besar yang ada di Surabaya, yaitu: PDIP, PSI, PKB, GERINDRA, PKS, yang dimana kelima partai tersebut merupakan partai pendukung dan partai non pendukung Eri Cahyadi pada saat Pilwali 2020, wawancara dengan partai politik dilakukan untuk melihat bagaimana dinamika politik Kota Surabaya pasca Pilwali 2020, wawancara bersama partai politik tersebut dilakukan sehari-hari karena tempat wawancara berbeda-beda serta menyesuaikan dengan jadwal informan. Keempat, wawancara dilakukan dengan masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya, masyarakat tersebut ada yang PKL, penjual batik, penjual handy carft, wawancara dengan masyarakat dilakukan untuk mengetahui implementasi dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan UMKM tersebut. Kelima, wawancara bersama akademisi yang konsern di bidang politik pembangunan ekonomi, wawancara dilakukan untuk melihat seperti apa pandangan akademisi terhadap program pemberdayaan UMKM tersebut.

- b) Kedua, observation, yang dilakukan secara langsung dengan mengamati perilaku individu dan interaksi dalam setting

penelitian. Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi SWK Taman Pertasi, Sentra UMKM Siola, observasi dilakukan untuk melihat seperti apa tempat pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya, fasilitas apa aja yang terdapat di tempat pemberdayaan UMKM tersebut. SWK Taman Pertasi tempatnya cukup strategis yang mana dekat dengan perkantoran, tempatnya cukup nyaman bagi terdapat mosholla dan toilet juga, dan SWK Taman Pertasi ini baru saja di tambah fasilitas untuk lesehan. Sedangkan Sentra UMKM Siola, tempatnya sangat bersih, nyaman, estetik, SPGnya juga ramah.

- c) Ketiga, analisis dokumen, hal ini berupa bukti yang tidak terdapat dalam interview dan observasi, namun dapat digunakan untuk. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data file yang diberikan oleh informan kepada peneliti, seperti: Rencana kerja dinas, profil Eri Cahyadi, Jumlah UMKM.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu



model “analisis data mengalir”. Analisis data mengalir yang dikemukakan oleh Miles Huberman tersebut terdiri dari tiga aktivitas, yaitu:<sup>59</sup>

- a) Pertama, reduksi data, merupakan proses penyeleksian, pemfokuskan, penyederhanaan, pengabstraksian, serta pentransformasian data mentah yang didapatkan dari catatan lapangan. Tahap ini dilakukan dengan cara mencatat semua hasil wawancara dan dokumen yang diberikan oleh informan, kemudian dilakukan penyeleksian data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b) Kedua, display data, merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh dan menghubungkan dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Bentuk display data umumnya menggunakan teks narasi. Setelah menyeleksi data yang cocok dengan penelitian, kemudian penulis menarasikan secara keseluruhan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.
- c) Ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan, merupakan kegiatan merumuskan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan akhir. Penarikan

---

<sup>59</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)* (Jambi: PUSAKA JAMBI, 2017), 105.

kesimpulan dilakukan dengan cara menjelaskan hasil akhir yang didapatkan dari penelitian ini.

### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dilakukan untuk menghilangkan bias pemahaman yang terjadi antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini triangulasi data dilakukan dengan cara wawancara bersama akademisi yang dianggap mempunyai pandangan netral terhadap penelitian ini.<sup>60</sup>

### **H. Sistematika Pembahasan**

#### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual. Bagian ini menggambarkan mengenai inti permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Sehingga pembaca mendapatkan informasi singkat terkait penelitian.

#### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini akan berisi tentang penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian kali ini dan kerangka teori. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui perbedaan dan originalitas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu.

---

<sup>60</sup> Samsu, 101.

Dalam bab II ini peneliti juga dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini yang nantinya akan menjadi alat analisis.

### 3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Bab III terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya, yaitu: Pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, pemilihan subyek penelitian, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, sistematika pembahasan.

### 4. BAB IV POKOK PENYAJIAN DAN ANALISA

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang deskripsi umum subjek penelitian dan penjelasan analisi terkait data dan fakta subyek penelitian, terutama yang berkaitan dengan rumusan masalah.

### 5. BAB V PENUTUP

Pada bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk pihak yang berkaitan dalam penelitian ini sehingga dapat memperbaiki penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

## BAB IV

### PENYAJIAN DAN ANALISA

#### A. Gambaran Umum Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya

Menurut Mubyarto, pemberdayaan adalah usaha untuk membangun masyarakat dengan cara memotivasi dan mendorong kesadaran masyarakat akan kemampuan yang dimiliki. Terdapat lima misi utama dalam pemberdayaan, yaitu Penyadaran, pengorganisasian; kaderisasi pendamping; dukungan teknis, dan pengelolaan sistem. Menurut Kartasasmita, upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu: <sup>61</sup> Pertama, membuat iklim yang kondusif agar masyarakat dapat berkembang. Kedua, memperkuat kemampuan masyarakat dengan cara menyediakan sarana prasarana yang mudah didapatkan. Ketiga, melindungi masyarakat yang lemah. Menurut Erwidodo, pemberdayaan dialokasikan kepada pelaku ekonomi bawah untuk meningkatkan kemampuan wirausaha.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang dikerjakan oleh orang perorangan atau kelompok yang mempunyai tujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Ni Nyoman Sunariani, Aan. Oka Suryadinata, and Ida Idm Rai Mahaputra, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kcil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali," *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 3.

<sup>62</sup>Riyanthi Idayu, Mohamad Husni, and Suhandi Suhandi, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 74.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 terdapat tiga definisi UMKM, yaitu: Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan yang mempunyai kekayaan bersih maksimal sejumlah Rp 50 juta, hal tersebut belum termasuk tanah dan tempat usaha, serta hasil penjualan maksimal sebesar RP 300juta/tahun. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dikerjakan oleh perseorangan bukan merupakan anak perusahaan, mempunyai kekayaan bersih antara Rp 50 juta-Rp 500 juta, hal tersebut belum termasuk tanah dan tempat usaha, serta hasil penjualan berkisar antara 300 juta-Rp 2,5 miliar. Ketiga, usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikerjakan oleh perseorangan, bukan merupakan anak perusahaan, mempunyai kekayaan lebih dari 500 juta-10 miliar belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta hasil penjualan berkisar antara 2,5 miliar-Rp 50 miliar.<sup>63</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 asas UMKM, yaitu: kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, kesatuan ekonomi nasional.<sup>64</sup>

Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh UMKM sendiri, yaitu: Bahan baku mudah diperoleh, menggunakan teknologi sederhana, keterampilan dasarnya sudah dimiliki secara turun temurun, memiliki sifat padat karya atau menyerap banyak tenaga kerja, peluang pasar cukup luas, kebanyakan

---

<sup>63</sup> Ni Nyoman Sunariani, dkk, 5.

<sup>64</sup> Maya Yusnita Dian Prihardini Wibawa, "Peran UMKM Sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan," *Jurnal Penelitian Manajemen Holistik 2*, no. 2 (2019): 3.

produknya diserap oleh pasar lokal namun tidak menutup kemungkinan dapat diekspor, beberapa komoditi mempunyai ciri khas budaya daerah setempat.<sup>65</sup> Ciri UMKM menurut Tambunan, yaitu: Pertama, berjumlah banyak dan menyebar. Kedua, padat karya. Ketiga, dikerjakan oleh berbagai lapisan. Keempat, menggunakan teknologi yang cukup sederhana. Kelima, mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Keenam, modal berasal dari tabungan milik pribadi. Ketujuh, produk relatif sederhana dan murah. Kedelapan, bersifat dinamis. Kesembilan, fleksibel serta dapat bertahan melawan pesaing dari industri besar.<sup>66</sup>

Pemberdayaan UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, karena berperan sangat besar dalam perekonomian nasional.<sup>67</sup>

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, tujuan dari pemberdayaan UMKM, yaitu: Menciptakan perekonomian nasional yang seimbang, meningkatkan ke mandirian, menumbuhkan peran dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, meratakan pendapatan, dan

---

<sup>65</sup>Abdul Halim, 19.

<sup>66</sup> Yusuf Hariyoko, "Pengembangan UMKM Di Kabupaten Tuban," *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 (2018): 1012.

<sup>67</sup> Esprit Novry Firstyananda, Khairunnisa Putri Rahma, and Susi Hardjati, "Program Kemitraan Upaya Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus : PT. Jasa Marga Surabaya Gempol)," *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 11, no. 1 (2021): 47.

mengentaskan kemiskinan.<sup>68</sup> Pemberdayaan UMKM penting untuk menciptakan program pembangunan nasional, dengan pemberdayaan UMKM diharapkan dapat mewujudkan perekonomian yang merata, adil, dan memiliki daya saing. Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategis dalam mempertahankan perekonomian nasional, sehingga dapat menciptakan sistem ekonomi kerakyatan.<sup>69</sup>

Menurut Ukkas, pemberdayaan UMKM berperan penting dalam mengantisipasi perekonomian utamanya dalam perekonomian nasional. Menurut Goso & Bachri, pemberdayaan UMKM diharapkan bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.<sup>70</sup> Menurut Sunyoto Usman, indikator kesuksesan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu: Pertama, bantuan modal usaha. Kedua, pembangunan prasarana. Ketiga, ketersediaan sarana. Keempat, pelatihan ekonomi masyarakat. Kelima, penguatan lembaga kemasyarakatan.<sup>71</sup>

Adapun UMKM yang menjadi pemberdayaan Pemerintah Kota Surabaya adalah UMKM yang termasuk kedalam golongan usaha mikro,

---

<sup>68</sup> Hasnati, Sandra Dewi, and Andrew Shandy Utama, "Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan M," *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 5, no. 2 (2021): 178.

<sup>69</sup> Farida Styaningrum, "Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 8 (2021): 661.

<sup>70</sup> Riyanthi Idayu, Mohamad Husni, and Suhandi Suhandi, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 75.

<sup>71</sup> Nina Widowati Definta Aliffiana, "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Sentra Industri Konveksi Dan Bordir Di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 5.

hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dua narasumber dalam penelitian ini. Pertama disampaikan oleh anggota DPRD Kota Surabaya yang mengungkapkan bahwa:

“Ketika berbicara UMKM, UMKM itu yang saya bicarakan yang mendapat mendampingan itu yang mikro yang banyak, pemberdayaannya yang banyak itu mikro, yang dapat pendampingan bukan yang usaha menengah, karena yang jadi wewenang Kota Surabaya itu adalah usaha mikro, artinya wewenang memberikan bantuan-bantuan itu, kalau sudah usaha kecil dan menengah itu wewenangnya provinsi.”<sup>72</sup>

Selanjutnya disampaikan oleh Ibu Tatik sebagai Sub Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro mengatakan bahwa UMKM yang menjadi intervensi Pemerintah Kota Surabaya adalah UMKM yang produksi rumahan<sup>73</sup>

Pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mempunyai bidang pemberdayaan usaha mikro yang bertugas melaksanakan di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi, menyusun, dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Luthfiah (Ketua komisi B DPRD Surabaya) pada tanggal 22 November 2022 pukul 14.06 WIB di Kantor DPRD Kota Surabaya.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.



pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>74</sup>

Usaha Mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pemberdayaan usaha mikro (UM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. UM menjadi satu sektor yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian Kota Surabaya, yang antara lain ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap PDRB Kota Surabaya melalui peningkatan produktivitas usaha.<sup>75</sup>

Intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha mikro adalah pendampingan dan pelatihan manajemen usaha. Pembinaan pelaku Usaha Mikro, juga dilakukan tersentral dengan lokasi tersebar di wilayah Kecamatan Kota Surabaya. Saat ini, di Surabaya terdapat 49 lokasi sentra atau tempat berkumpulnya para pedagang yang dulunya merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL). Lokasi Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Surabaya sebagaimana pada tabel berikut:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Dokumentasi Renstra Diskoperindag Kota Surabaya Tahun 2021-2026

<sup>75</sup> Dokumentasi Renja Diskoperindag Kota Surabaya Tahun 2022

<sup>76</sup> Dokumentasi Renja Diskoperindag Kota Surabaya Tahun 2022

Gambar 4.1. Data Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya<sup>77</sup>

Intervensi yang sudah diberikan untuk Sentra Wisata Kuliner yakni: Pertama, pelatihan peningkatan kualitas mutu pedagang SWK. Kedua, pendampingan ke pedagang SWK. Ketiga, fasilitasi pemasaran dengan pembuatan media foto untuk promosi. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu intervensi juga dilakukan melalui bantuan permodalan. Bantuan permodalan didapatkan dari beberapa perusahaan antara lain : KUR BRI, PT Telkom, Bank BTPN Syariah, Bank BRI, Koperasi Juragan Sukses Surabaya, PT. Jasa Marga, PT. Semen Gresik, Pertamina, KOPWAN, PT. Pegadaian, Bank Mandiri, Bank JATIM, PT. Pelindo III dan PNPB.<sup>78</sup>

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan aksesibilitas pemasaran produk juga dilakukan secara online dan offline. Peningkatan kesadaran para pelaku usaha yang mulai menyentuh strategi digital marketing. Tercapainya target prosentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran usaha produk

<sup>77</sup> Dokumentasi Dinkopdag Kota Surabaya

<sup>78</sup> Dokumentasi Renja Diskoperindag Kota Surabaya Tahun 2022

dikarenakan adanya kegiatan fasilitasi pemasaran yang diluar perencanaan termasuk adanya kerjasama pembinaan usaha mikro dengan pihak ketiga, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah usaha mikro yang terfasilitasi. Salah satu kerjasama yang dilakukan yaitu dengan menyelenggarakan pameran virtual. Selain melakukan pembinaan, Dinas juga memasarkan produk UKM di Sentra dan Stand UKM yang dikelola Dinas. Berikut lokasi Sentra dan Stand UKM yang dikelola oleh Dinas:<sup>79</sup>

**Gambar 4.2. Data Sentra UMKM Kota Surabaya<sup>80</sup>**

**Tabel 2.3**  
**Sentra dan Stand UKM**

No	Nama Sentra/Stand Usaha	Alamat Sentra/Stand Usaha	Kabupaten dan Kecamatan	Lokasi Sentra/Stand Usaha (m <sup>2</sup> )
1	Sentra UKM Tunjungan City	Jl. Tunjungan No. 11-9 (S.36/01) Surabaya	Surabaya	20 X 10 Meter
2	Sentra UKM Mulyo	Jl. Dr. H. H. Soekarno No. 11, Medukan, Kecamatan, Surabaya	Surabaya	200 m <sup>2</sup>
3	Stand UKM Lapangan Pahlawan Wisma Hotel Negeri	Jalan Pahlawan (didepan JPD Kecamatan Gubeng Surabaya)	Surabaya	100 X 20 Meter
4	Stand UKM Pahlawan Plaza	Jl. Mayjen. Sungkono No. 122 (Jl. 11) (Gubung Sari, District Pahlawan Surabaya)	Daerah Pahlawan	17 X 8 Meter
5	Stand UKM M. ICSA	Jl. Hidayat No. 115 - 117 (Jl. Dukung, Semoran, Kecamatan) Surabaya	Semoran	20 X 20 Meter
6	Stand UKM Transnasional	Jl. Jendral No. 1 (Jl. 11) Surabaya	Widadaerah	5 X 20 Meter
7	Stand UKM KCS Surabaya	Jl. Sidal No. 1, Darmas, Widadaerah, Surabaya	Widadaerah	8 X 8 Meter
8	Stand UKM Komplek Wisma Mula Mahkota J. Raya Mahkota No. 1, Widyadarmas, Kecamatan, Surabaya	Widyadarmas	3 X 5 Meter	
9	Stand UKM Baitul Makmur (KCS)	Jl. Sukarta No. 10 (Jl. 11) 22 Widyadarmas, Kecamatan, Surabaya	Sidik	3 X 3 Meter
10	Stand UKM Mitra Surabaya Timur	Jl. Raya Sidal No. 37C, Madya, Kecamatan, Surabaya	Madya	20 X 10 Meter
11	Stand UKM Lapangan Pahlawan Akuat Pahlawan Negeri	Jl. Akuat Pahlawan Negeri No. 100, Kecamatan Pahlawan, Surabaya, Surabaya	Sidik	20 X 8 Meter
12	Stand UKM Transnasional Putat Jaya	Putat Surabaya dan Transnasional Putat Jaya, Logga Mahayogya Surabaya, Widyadarmas, Kabis, Surabaya	Widyadarmas	20 X 20 Meter

13	Sentra Baitul Makmur	Jl. Pahlawan No. 100 (Jl. 11) 22 Widyadarmas, Kecamatan, Surabaya	Sidik	10 m <sup>2</sup>
14	Sentra Baitul Makmur (KCS)	Jl. Pahlawan No. 100 (Jl. 11) 22 Widyadarmas, Kecamatan, Surabaya	Sidik	200 m <sup>2</sup>
15	Sentra Akuat	Jl. Akuat Pahlawan No. 100 Surabaya	Sidik	20 X 10 Meter

<sup>79</sup> Dokumentasi Renja Diskoperindag Kota Surabaya Tahun 2022

<sup>80</sup> Dokumentasi Diskoperindag Kota Surabaya

## **B. Politik Pembangunan Eri Cahyadi Untuk Pemberdayaan UMKM Kota Surabaya**

Ketika berbicara politik maka kita akan berbicara mengenai cara memperoleh kekuasaan, di mana di dalamnya terdapat aktor yang memiliki pengaruh politik, seperti yang di kemukakan oleh Lasswell, *Who* adalah aktor politik yang mempunyai hak dan kewajiban dalam politik, dapat berupa individu atau kelompok, adapun dalam penelitian ini yang dimaksud adalah aktor politik, yaitu Eri Cahyadi. *Get what*, sesuatu yang diperjuangkan oleh aktor dan dapat berupa kekuasaan, dengan program Eri yang lebih konsern dibidang ekonomi dan pemilihan yang dilakukan ditengah krisis ekonomi, maka pada saat Pilwali 2020 Eri dapat dengan mudah mendapatkan suara masyarakat sehingga kekuasaan dapat diraihny. *When*, waktu yang digunakan oleh aktor untuk mendapatkan kekuasaan, waktu yang gunakan Eri untuk mendapatkan kekuasaan adalah pada saat Pilwali Kota Surabaya 2020. *How*, dengan kekuasaan yang sudah didapatkan tersebut Eri dapat melakukan program pemberdayaan UMKM, ketika program tersebut berhasil maka jika periode selanjutnya Eri ingin mencalonkan diri kembali kekuasaan dapat diraihny. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana politik pembangunan pasca elektoral yang dilakukan oleh Eri Cahyadi.

Warjio mendefinisikan politik pembangunan sebagai satu usaha yang dilakukan oleh aktor seperti individu atau kelompok/negara baik lokal maupun internasional, secara struktur atau tidak. Dalam penelitian ini

politik pembangunan dilakukan oleh aktor individu yang dilakukan secara terstruktur melalui program atau kebijakan. Politik pembangunan bukan hanya mengkaji latar belakang pembangunan, tetapi juga mengkaji proses yang terdapat dalam sebuah pembangunan, mulai dari siapa aktor atau kelompok kepentingan yang terlibat, idea atau paham apa yang digunakan dalam pembangunan. Ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Warjio dalam politik pembangunan yaitu terkait pertanyaan tentang: Siapa (*who*), apa (*what*), bagaimana (*how*) dan mendapat apa (*get what*). Sesuai dengan teori di atas maka penulis akan menganalisis bagaimana politik pembangunan yang dilakukan oleh Eri Cahyadi.<sup>81</sup>

#### **a. Aktor Politik Pembangunan**

Aktor politik pembangunan adalah mereka yang memiliki peran utama dalam proses pembangunan yaitu dapat mencakup individu, kelompok atau negara yang memiliki naluri dan kepentingan politik dalam pembangunan. Adapun aktor pembangunan dalam penelitian ini adalah Eri Cahyadi, sehingga level analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah level individu, sehingga analisis kajian politik pembangunan pada penelitian ini dipusatkan pada peran, strategi, atau ideologi pemikiran politik pembangunan yang dilakukan oleh Eri Cahyadi. Level analisis digunakan dalam penelitian ini agar membantu kita untuk memudahkan mencari fokus kajian.

---

<sup>81</sup> Warjio, 111.

Eri Cahyadi, S.T, M.T adalah warga asli Suroboyo yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Mei 1977 . Eri menyelesaikan pendidikan D-III di Teknik Sipil ITS Surabaya, kemudian melanjutkan S1 di Teknik Sipil ITATS Surabaya, dan pendidikan terakhirnya S2 Magister di Teknik Sipil UNTAG Surabaya. Eri berlatar belakang seorang birokrat yang sudah berkisah dan mengabdikan cukup lama di Pemerintah Kota Surabaya.<sup>82</sup>

Adapun kiprah Eri di Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut: Tahun 2006 ia menjabat Direktur Sekretariat Layanan e-Proc. Tahun 2010 ia menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Bagian Bina Program. Tahun 2011 ia menjabat Sekretaris Koordinator Utama LPSE Surabaya. Tahun 2013 ia menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Tahun 2015 ia menjabat Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Tahun 2017 ia menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang. Tahun 2018 ia menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan di tahun yang sama ia juga menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Pada tahun 2021 ia menjabat sebagai Wali Kota Surabaya yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021.<sup>83</sup>

Sebagai seorang Wali Kota tentu Eri dapat berperan langsung secara institusional dengan kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya.

Kekuasaan menjadi syarat penting dalam pembangunan, kekuasaan

---

<sup>82</sup> Dokumentasi DPC PDIP Kota Surabaya

<sup>83</sup> Dokumentasi DPC PDIP Kota Surabaya

merupakan apa yang dimiliki oleh Eri dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan, sebagai seorang Wali Kota sudah jelas bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Eri berupa hard power. Tanpa kekuasaan sulit bagi Eri untuk mengintervensi pembangunan, dengan kekuasaan Eri dapat dengan mudah mewujudkan tujuan pembangunan. Sebagai Kepala Daerah Eri mempunyai tugas sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:<sup>84</sup>

Pertama, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedua, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Keempat, menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD. Kelima, mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Keenam, mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah. Ketujuh, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Warjio, politik pembangunan bukan hanya menjelaskan mengenai cara atau strategi yang ingin dicapai dalam pembangunan, akan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang terdapat dalam pembangunan. Eri sebagai politisi yang diusung oleh PDIP dalam Pilwali Surabaya 2020, memiliki pemikiran atau ideologi yang sama dengan PDIP, yaitu Pancasila. Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai

---

<sup>84</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014

Demokrasi Indonesia Perjuangan pada bab II menjelaskan tentang Asas, Jati diri dan Watak PDI Perjuangan berasaskan Pancasila. Kemudian dijelaskan, Jati diri partai adalah Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Sedangkan watak partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner.<sup>85</sup> Politik pembangunan tidak hadir dalam ruang kosong, namun sengaja dihadirkan oleh para aktor yang di mana aktor memiliki nilai atau ideologi. Ideologi menjadi syarat mutlak dalam politik pembangunan, Ideologi menggerakkan pembangunan karena di dalamnya terkandung semangat ataupun cita-cita.

Sebagai seorang pemimpin Kota Surabaya berikut karakter Eri Cahyadi menurut Partai Politik Kota Surabaya: Pertama, menurut PDIP sebagai partai yang mengusung Eri Cahyadi dalam Pilwali 2020, menilai bahwa Eri Cahyadi adalah seorang yang muda, visioner, berani mengambil resiko, tidak takut untuk tidak populer, berani mengambil keputusan yang cepat. Menurut PDIP Eri Cahyadi juga sosok yang dekat dengan masyarakat dilihat dari kepuasan masyarakat Surabaya terhadap pemerintahan Eri diatas angka 80%.<sup>86</sup>

Kedua, menurut PSI sebagai partai yang mendukung Eri Cahyadi dalam Pilwali 2020, Eri Cahyadi merupakan sosok yang sangat religius, bukan seorang pejabat yang menakutkan tetapi seorang pejabat yang

---

<sup>85</sup> Hasnu, Firdaus Syam, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP Dan Islam Moderat PKB," *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): 1626.

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Hidayat, S.Sos. (Wakil Sekretaris Bidang Program PDI Perjuangan Kota Surabaya) pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.52 WIB di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.



disegani, pintar membawa diri, ketika terjun kemasyarakat menggunakan bahasa yang simpel, PSI juga melihat Eri Cahyadi dekat dengan masyarakat hal itu menurut PSI sudah terlihat ketika Eri menjabat sebagai Ketua Bapeko Kota Surabaya yang tidak enggan turun langsung ke masyarakat.<sup>87</sup>

Ketiga, menurut partai Gerindra sebagai partai non pendukung Eri Cahyadi pad Pilwali 2020, Gerindra menilai kalau dalam sistem kepemimpinannya Eri lebih mendekatkan diri kepada seluruh partai politik, jika berbicara mengenai kedekatan Eri dengan masyarakat menurut Gerindra di depan media dekat-dekat aja.<sup>88</sup>

Keempat, menurut PKB sebagai partai non pendukung Eri Cahyadi pad Pilwali 2020, Eri adalah sosok yang ideal, mau bekerja keras, orangnya terbuka, tidak pandang bulu terhadap kelompok apa saja, semua dirangkul, baik pendukung maupun yang tidak mendukung diajak bicara mengenai problem kota Surabaya. Menurut PKB, Eri dipandang masyarakat dapat bekerja lebih baik dari bu risma, kalau dilihat dilapangan Eri merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat.<sup>89</sup>

Kelima, menurut PKS sebagai partai non pendukung Eri Cahyadi pad Pilwali 2020, Eri adalah sosok seorang birokrat dengan track rekod yang bagus, sebagai politisi baru Eri dapat berkomunikasi dengan baik terhadap partai yang yang dulu tidak mendukungnya, menurut PKS

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuga Pratisabda Widyawasta, S.T. (Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya) pada tanggal 24 November 2022 pukul 12.45 WIB di Kantor DPD PSI Kota Surabaya.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Alim, M.Pd.I. (Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya) pada tanggal 25 November 2022 pukul 16.12 WIB di Kantor DPRD Kota Surabaya.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Musyafak Rouf, MH. (Ketua DPC PKB Kota Surabaya) pada tanggal 28 November 2022 pukul 15.51 WIB di Kantor DPC PKB Kota Surabaya.

terpilihnya Eri sebagai Wali Kota Surabaya merupakan indikasi bahwa Eri merupakan sosok yang dekat dengan masyarakat.<sup>90</sup>

Dengan rekam jejak sebagai seorang birokrat yang baik dan kepribadian Eri Cahyadi yang dianggap ideal untuk memimpin Kota Surabaya serta sosoknya yang dinilai dekat dengan masyarakat, maka sudah seharusnya Eri membuat program yang berpihak kepada masyarakat serta program yang dapat mensejahterakan masyarakat, dengan kepemimpinan yang tepat akan membantu proses pembangunan suatu daerah.

#### **b. Isu Politik Pembangunan**

Isu atau topik tertentu yang berhubungan dengan politik pembangunan akan menjadi fokus penelitian dalam bidang politik pembangunan. Adapun isu politik pembangunan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pembangunan ekonomi melalui program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintahan Eri Cahyadi. Sesuai dengan penjelasan pada pembahasan sebelumnya yang dimana Ideologi adalah semangat yang menjadi penggerak aktor pembangunan untuk meraih tujuan dan ideologi Eri Cahyadi adalah Pancasila yang didalamnya terdapat kerakyatan, maka tujuan yang diharapkan dari program pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Fahrudin, ST (Bendahara DPD PKS Kota Surabaya) pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 13.47 WIB di Kediaman Bapak Arif Fahrudin, ST.

<sup>91</sup> Warjio, 112.

Eri Cahyadi sangat konsern dalam perekonomian hal ini dapat dilihat melalui tiga dari sepuluh misi Eri Cahyadi pada saat Pilwali Kota Surabaya 2020 mengenai perekonomian. Adapun alasan yang melatar belakangi hal tersebut menurut partai pendukungnya saat Pilwali Kota Surabaya 2020, menurut PDIP:

“Karena kalau urusan infrastuktur sudah selesai di Era Bu Risma, pengurusan taman-taman kota, pembangunan gedung kota, mall pelayanan publik sudah selesai di era Bu Risma. Sekarang melakukan meberdayaan masyarakat melalui UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat dengan infrastuktur yang sudah ada, Bu Risma sudah membangun banyak SWK Bu Risma sudah membangun puluhan pasar rakyat, taman, rumah sakit, sekolah yang memadai tinggal bagaimana menyempurnakan dan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Pak Eri tidak memiliki niat mau dianggap sama atau berbeda dengan pendahulunya, itu adalah konsep pembangunan bagaimana itu bermanfaat atau tidak kepada warganya.”<sup>92</sup>

Sedangkan menurut PSI mengungkapkan:

“Karena pemilihan dilakukan ditengah pandemi yang dimana perekonomian diseluruh dunia runtuh, maka fokus utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa fokusnya di ekonomi karena roda ekonomi harus berjalan harus naik, stimulus-stimulus untuk perputaran roda ekonomi ini biar lancar kembali seperti seperti sebelum pandemi, baru kalau sudah lancar kita keprogram yang lain. Kita gimana mau mensejahterakan rakyat kalau ekonomi dikota surabaya tidak baik-baik saja”.<sup>93</sup>

Melihat pernyataan dari PDIP konsep pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh Eri memanglah bagus, karena dalam pembangunan sebuah kota itu keberlanjutan penting, kesinambungan itu penting. Namun

---

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Hidayat, S.Sos. (Wakil Sekretaris Bidang Program PDI Perjuangan Kota Surabaya) pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.52 WIB di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

<sup>93</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Yuga Pratisabda Widyawasta, S.T. (Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya) pada tanggal 24 November 2022 pukul 12.45 WIB di Kantor DPD PSI Kota Surabaya.

disisi lain apa yang diungkapkan oleh PSI menunjukkan bahwa hal tersebut juga merupakan salah satu cara Eri untuk memenangkan pemilihan pada Pilwali 2020, Pilwali 2020 dilakukan ditengah pandemi Covid-19 dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, maka ketika ada seorang politisi yang melakukan konsern program kepada pemulihan ekonomi secara tidak langsung akan mendapatkan simpati masyarakat dengan mudah. Adapun alasan Eri Cahyadi melakukan progam memperdayaan UMKM menurut anggota DPRD Kota Surabaya, yaitu:

“Karena pandemi covid-19 membuat perekonomian yang ada dikota Surabaya mengalami penurunan, APBD menurun, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, masyarakat mengalami kesusahan untuk makan. Hal tersebut yang akhirnya menjadi inisiatif pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan pemberdayaan UMKM, pemerintah berharap melalui pemberdayaan UMKM masyarakat dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, seperti yang awalnya tidak bisa membuat packaging yang menarik dengan adanya pemberdayaan masyarakat dapat membuat packaging yang menarik. Hal tersebut akhirnya membuat produk yang mereka miliki mempunyai daya saing sehingga dapat meningkatkan penjualan dan akhirnya bisa meningkatkan pendapatan mereka”.<sup>94</sup>

Selanjutnya pandangan partai politik Kota Surabaya terkait alasan Eri Cahyadi melakukan Progam memperdayaan UMKM, mayoritas dari partai politik seperti: PDIP, PSI, PKB, GERINDRA berpandangan bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilakukan untuk meningkatkan taraf perekonomian warga Kota Surabaya, menyelamatkan serta memulihkan perekonomian kota Surabaya dari pandemi Covid-19, mengatasi

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Luthfiah (Ketua komisi B DPRD Surabaya) pada tanggal 22 November 2022 pukul 14.06 WIB di Kantor DPRD Kota Surabaya.

kemiskinan dan pengangguran yang ada di Surabaya. Partai politik tersebut melihat bahwa UMKM menjadi salah satu penyerap tenaga kerja yang luar biasa dan bisa penopang ekonomi kerakyatan dikota Surabaya, namun selama ini UMKM hanya bisa nyambung hidup setiap hari tidak ada inovasi yang signifikan, maka dari itu UMKM perlu menjadi konsern pemerintah agar UMKM dapat melipat gandakan keuntungannya, melipat gandakan kemampuannya, melipat gandakan jangkauan pasarnya, sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang lebih baik, yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Surabaya.

Selain untuk mensejahterakan masyarakat alasan Eri melakukan program UMKM adalah untuk mewujudkan janji politiknya pada Pilwali 2020, dimana hal tersebut diungkapkan oleh PKS yang mengatakan, bahwa:

“Karena salah satu dari janji politik Eri Cahyadi adalah 7juta/kepala keluarga. Dengan melihat UMR dikota surabaya 4,2jt sedangkan angka kebutuhan disurabaya beragam, maka selain pendapatan kepala keluarga juga ada pendapatan lain. Sehingga perlu menumbuhkan semangat menambah penghasilan sehingga 7jt/kepala keluarga itu dapat terwujud, maka salah satu cara nya adalah berwirausaha melalui UMKM”.<sup>95</sup>

Adapun pandangan dari akademisi mengenai alasan Eri Cahyadi melakukan

Progam memperdayan UMKM yaitu:

“Kalau dilihat dari tahap pembangunan itukan setelah infrastuktur disipkan dimana infrastuktur itu kebanyakan kita ketahui bersama dibenahi jamannya Bu Risma, mentalitas aparat dibenahi jamannya Pak Bambang maka saat berikutnya yang harus dibangun jiwanya, jiwanya dari mana salah satu diantaranya salah satu caranya UMKM itu tadi karena mereka sebetulnya penopang dari perekonomian rakyat dan selain walikota terpilih itu dari partai yang mengklam

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Fahrudin, ST (Bendahara DPD PKS Kota Surabaya) pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 13.47 WIB di Kediaman Bapak Arif Fahrudin, ST.

sebagai partainya wongcilik jadi wajar kalau keberpihakan ada disitu”.<sup>96</sup>

Pernyataan tersebut menjadi titik terang peneliti untuk menggunakan analisis pendekatan sejarah politik, yang dimana sudah disampaikan pada bagian teori bahwa sejarah politik dalam politik pembangunan menjadi satu perspektif yang menekankan bagaimana kekuasaan-kekuasaan pada masa lalu baik yang dilakukan oleh negara, institusi ataupun individu melakukan pembangunan. Hal ini sudah jelas bahwa pembangunan yang dilakukan Eri merupakan keberlanjutan dari tahap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, serta usaha Eri untuk mewujudkan janji politiknya pada Pilwali 2020. Aktor politik pembangunan akan menggunakan perspektif politik pembangunan untuk membenarkan kebijakan pembangunan yang dibuatnya dan seterusnya untuk kelangsungan kekuasaan yang dimilikinya melalui kebijakan pembangunan itu.<sup>97</sup>

### **c. Strategi Politik Pembangunan**

Strategi politik pembangunan disini berkaitan dengan sistem yang merupakan mekanisme yang dipunyai oleh aktor yang dapat menggerakkan sebuah pola pembangunan. Sebuah sistem akan berpengaruh kepada proses pembangunan yang dijalankan dan untuk mencapai tujuan. Adapun mekanisme pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD (Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.09 WIB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

<sup>97</sup> Warjio, 160.

Surabaya berupa fasilitasi, adapun fasilitasi yang dilakukan secara bertahap, berikut penjelasan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya:

“UMKM yang masih pemula kita bekali NIB selanjutnya dipasarkan di even kecil, setelah itu tidak mungkin kita lepas begitu saja pasti dibina lagi oh ternyata setelah dipasarkan kemasannya kurang, cita rasanya kurang, itu kita latih lagi, nantik di datengi chef ada kurasinya juga, nantik dinilai kurang apa kurang apa kalau mau diupgrade kita datangkan mentor untuk pelatihan packing pelatihan foto grafi, jadi kita modelnya kita tidak bisa cuma fokus satu pemasaran aja terus dilepas jadi bertahap gitu model pendampingannya bertahap”<sup>98</sup>

Untuk mengikuti program pemberdayaan UMKM masyarakat cukup mudah dengan cara datang ke Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya atau ke Pelayanan atau ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya, dengan membawa syarat yang diperlukan, seperti: KTP surabaya, berdomisili di Surabaya, produknya bikin sendiri.<sup>99</sup> Berikut penjelasan lengkap mengenai jenis fasilitasi program pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya:

*Pertama*, ada fasilitasi pemasaran yang dilakukan dengan berbagai cara, pertama melalui event pameran dan bazar seperti yang di ungkapan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya:

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Fibrina, S.E (Staf Pemberdayaan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

“Jadi kalau pameran umkm tidak mengeluarkan uang seperserpun kita tidak ada pungutan. Kebetulan kita aktif kerjasama dengan pihak luar seperti di mall, seperti di Royal Plaza kita kenalan sama manajemennya bisa gk kasih even gratis, kalau yang bayar juga ada timeline kegiatan setiap tahun seperti karnaval nak tunjungan, ada surabaya gret expo, surabaya fashion week. Cara biar bisa ikut even dan pelatihan kita gantian misal UMKM sudah ikut pameran kita ada catatannya, seperti umkm ini sudah ikut SGE kemarin, kalau ada even lagi kita nanti UMKM lain lagi kita gantian”.<sup>100</sup>

Selain event fasilitasi pemasaran juga melui tempat berupa Sentra Wisata Kuliner (SWK), sentra UMKM, rumah padat karya. Sentra Wisata Kuliner (SWK) adalah tempat berkumpulnya para Pedagang Kaki Lima (PKL), terdapat 49 lokasi Sentra Wisata Kuliner sampai saat ini. Adapun penjelasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengenai SWK:

“Ada pendampingan yang dilakukan oleh dinas, dua SWK didampingi satu pendamping yang memonitor aktifitas apa saja yang dilakukan, seperti pembayaran restribusi. Biaya restribusi setiap SWK tidak sama, patokannya ada di Perda No 1 Tahun 2022, dimana 20rb/meter jadi ristribusinya tergantung ukuran stan usahanya. Tata tertib SWK juga diatur sendiri sesuai kesepakatan pedagang tidak ada aturan dari dinas. Ada pelatihan, namun mengikuti anggaran yang sudah di plot kemudian kita analisa SWK mana yang sekiranya diperlukan pelatihan. Berapa bulan sekali tergantung, kalau tahun ini ada 11 SWK yang dianggarkan”.<sup>101</sup>

Selain SWK yang menjadi tempat pemasaran UMKM, ada juga sentra UMKM, yang berupa stan yang menjadi tempat untuk pemasaran produk UMKM, tidak ada biaya restribusi apapun yang dikeluarkan oleh

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Fibrina, S.E (Staf Pemberdayaan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.



pelaku UMKM jika menitipkan produknya di Sentra UMKM, hasil penjualannya juga akan diinformasikan secara transparan setiap bulannya kepada pelaku UMKM. Saat ini ada 10 jumlah Sentra UMKM yang ada di Kota Surabaya. Selanjutnya ada rumah padat karya merupakan tempat pemasaran sekaligus pelatihan UMKM yang memanfaatkan aset Pemerintah Kota Surabaya.<sup>102</sup>

Fasilitasi pemasaran selanjutnya dilakukan dengan menjalankan kemitraan bersama dengan brand ternama seperti: Indomart, Alfamart, SOGO, MR. DIY, UNIQLO dengan tujuan memasarkan produk. Berikut penjelasan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengenai kemitraan:

“Toko swalayan seperti produk yang di pasarkan indomaret itu ada broncip coklat itu adalah produk UMKM, ada kacang bukmay, kadang ada sambel. Misalnya kita masukkan di ikea tetap memakai kurasi.”<sup>103</sup>

Adapun fasilitasi pemasaran digital yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui aplikasi E-Peken. E-Peken merupakan sebuah aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah Kota Surabaya yang berbasis mobile, digunakan untuk menghubungkan sebuah toko kelontong dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan seorang konsumen di Kota Surabaya. Aplikasi e-peken sendiri telah launching pada tanggal 31 Oktober 2021.

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Fibrina, S.E (Staf Pemberdayaan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya

Berikut penjelasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengenai E-Peken:

“E-Peken ada karena adanya Covid-19, kalau dulu pemasaran bisa lewat pameran, bazar, setelah adanya pandemi tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka pemerintah berinisiatif membuat E-Peken agar UMKM bisa berjualan tanpa tatap muka. E-Peken sebenarnya untuk umum, cuma lebih diwajibkan ASN, ASN wajib membeli semua pembelanjaan makanan minuman untuk rapat dinas lewat E-Peken. Masing-masing ASN punya target pembelian, kalau limid yang digunakan ASN kurang pasti diingatkan, Tapi itukan pemerintah bukan mewajibkan tapi menghimbau kita juga memiliki kesadaran membangkitkan perekonomian buat UMKM. Kalau dari sisi omset dan jumlah umkm yang terdaftar juga cukup banyak maka dari penilaian dinas sendiri peken sudah efektif. Banyak melakukan perubahan, pembaruan, serta sosialisasinya diperluas agar tidak kalah saing dengan aplikasi umumnya. kedepannya juga akan diarahkan ke e-katalog, sempat melakukan kerjasama dengan Grab dan JNE untuk menambahkan fitur pengiriman agar lebih otomatis.”<sup>104</sup>

*Kedua*, Fasilitasi yang dilakukan berupa pelatihan. Pelatihan umumnya dilakukan untuk UMKM pemula. Sitemnya sama dengan pemeran yang sebelumnya sudah dijelaskan, dimana dilakukan pemetakan terlebih dahulu UMKM mana yang lebih membutuhkan pelatihan, umunya dilakukan pada UMKM yang kualitas atau tampilannya kurang bagus, contoh: Pelatihan bersama tristan akademi, bogasari, mengundang chef, pelatihan packging, pelatihan foto produk dengan fotografer, pelatihan penataan keuangan bersama bank indonesia dan bank jatim, serta pelatihan dilakukan bagi SWK agar mereka tidak mencampurkan uang pribadi dengan uang usahanya. Pelatihan dilakukan beberapa bulan sekali tergantung

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Fibrina, S.E (Staf Pemberdayaan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

anggaran, namun hampir setiap bulan ada pelatihan, adapun pelatihan yang terakhir dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota adalah pelatihan enceng gondok. Berikut penjelasan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya:

“Jadi kita undang umkm yang bergerak dibidang kerajinan siapa yang minat pelatihan kita datangkan umkm senior yang udah lama mengggeluti eceng gondok jadi pelatihannya siapa yang butuh, kita ngundang orang harus sesuaikan.”<sup>105</sup>

*Ketiga*, fasilitasi perizinan, hal ini berkenaan dengan legalitas legalitas produk dan legalitas usaha. Adapun fasilitasi perizinan produk berupa sertifikasi halal, PIRT, BPOM. Sedangkan fasilitasi perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan merek. Berikut penjelasan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengenai perizinan:

“DINKOPDAG memfasilitasi formulir pendaftaran merk karena merk itu membayar di KEMENKUMHAM namun kalau itu UMKM yang diperdayakan mendapatkan diskon, tetapi khusus kalau itu mendaftarnya di Pemkot surabaya dan waga Surabaya ke DINKOPDAG itu kita bantu memberdayakan mereka dengan nol rupiah paling bawa materai aja.”<sup>106</sup>

*Kempat*, fasilitasi permodalan, Pemerintah Kota Surabaya tidak memberikan bantuan langsung tunai kepada UMKM namun lebih kepada memberikan fasilitas akses permodalan dengan mengundang lembaga

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Fibrina, S.E (Staf Pemberdayaan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

keuangan seperti bank jatim, bank Mandiri, BPRSAU, bank BRI, agar dapat memberikan bantuan. Menengai besaran modal yang di berikan oleh Bank kepada UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya mengatakan:

“Karena Bank kalau pinjam ada kriteria sendiri harus ada BI checking, berapanya tergantung kebutuhan paling 5jt keatas kalau pinjaman kan dilihat kemampuan dari ukm jaminannya apa muternya duit umkm setiap bulan berapa pendapatannya berapa itukan mereka juga punya penilaian sendiri. Jadi adana dari APBD itu tidak dikasih dana secara langsung jadi ibaratnya kalau orang bukan ngasih umpannya tapi ngasih kailnya.”<sup>107</sup>

Melihat program pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan cara fasilitasi, dengan dana yang sudah disiapkan jangan sampai program ini hanya formalitas dan kurang substantif. Dana yang sudah disiapkan untuk pelatihan jangan sampai hanya sekedar formalitas saja dan tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat. Dengan dana yang sudah disipakan jangan sampai terdapat UMKM bayangan yang mendapatkan fasilitas tersebut, karena seperti yang kebanyakan terjadi di Indonesia kalau UMKM itu spesialis paremeran. Namun disisi lain dengan cara fasilitasi tersebut membuat masyarakat lebih mandiri dan mau berusaha, mengingat pemerintah hanya memberikan kail bukan umpan.

Melihat program pemberdayaan UMKM sendiri yang merupakan program yang sangat bersentuhan langsung dengan sektor masyarakat terutama masyarakat MBR, di tambah lagi dengan sistem pemberdayaan

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratih Fibrina, S.E (Staf Pemberdayaan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

UMKM yang dilakukan dengan acara fasilitasi yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan syarat yang diperlukan untuk mengikuti program pemberdayaan UMKM juga cukup mudah, yaitu: KTP surabaya, berdomisili di Surabaya, produknya bikin sendiri, serta transparansi regulasi seperti: SWK yang regulasinya di atur sesuai Perda, hasil pemasaran sentra UMKM yang di laporkan setiap bulan secara transparan, tidak ada pungutan dalam event yang dilakukan.

Semua itu menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan Eri menggunakan model demokratik, yang dimana memberikan peluang partisipatif yang lebih luas bagi masyarakat dengan keterbukaan, kemudahan, dan akuntabilitas yang sudah disebutkan di atas. Partai PKS juga menjelaskan bahwa:

“Kita lihat acara yang diadakan menggunakan jalur birokrasi bukan jalur dari tim pemenangan dan sifatnya terbuka, kalau terbukakan siapapun bisa akses, Cuma selama ini orang yang sering berinteraksi akan lebih cepat dapat informasi tapi bukan berarti itu tertutup, saya kira masih cukup fair.”<sup>108</sup>

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tersebut dilakukan evaluasi setiap bulannya. Anggota DPRD Kota Surabaya juga menyampaikan bahwa setiap pembahasan anggaran selalu memantau progres dari program pemberdayaan UMKM ini. Dari sisi masyarakat juga mengatakan bahwa pemerintah cukup tanggap dalam mengatasi

---

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Fahrudin, ST (Bendahara DPD PKS Kota Surabaya) pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 13.47 WIB di Kediaman Bapak Arif Fahrudin, ST.

permasalahan yang ada. Partai politik yang tidak mendukung Eri dalam Pilwali 2020 juga mengatakan bahwa Eri rutin menjalin komunikasi dengan ketua parpol untuk sambung rasa sambung ide, Eri mengajak bicara tentang pembangunan dan rencana kota surabaya kedepan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan Eri berjalan secara demokratis dimana rakyat bisa menjadi kotrol pemerintah.

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dilakukan Eri menggunakan pendekatan campuran, di mana antara aktor pembangunan di level atas (top-down) melakukan kolaborasi dengan aktor bawah (botton-up). Biasanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (top-down) kemudian diminta masukan dari masyarakat, sesuai dengan program pemberdayaan UMKM yang merupakan program inisiatif pemerintah kota Surabaya agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta masyarakat yang dapat mengontol program ini.

#### **d. Hasil Politik Pembangunan**

Sesuai dengan data yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dengan jumlah 5544. Dan berikut keterangan yang disampaikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya:

“Karena kalau ngomong jumlah data yang dimiliki dinkopdag dan berapa jumlah yang diikutkan pemberdayaan itu sama, karena yang masuk ke Dinkopdag semua diberdayakan, karena pemberdayaan yang dilakukan juga berbagai macam”<sup>109</sup>

**Gambar 4.3. Data Jumlah UMKM Kota Surabaya<sup>110</sup>**

Pelaku UMKM Kota Surabaya per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah
ASEM ROWO	81
BENOWO	152
BUBLUTAN	183
BULAK	99
DUKUH PAKIS	119
GAYUNGAN	163
GENTENG	247
GUBENG	276
GUNUNG ANYAR	121
JAMBANGAN	181
KARANG PILANG	166
KENJERAN	175
KREMBANGAN	164
LAKARSANTRI	125
MULYOREJO	134
PABEAN CANTIAN	130
PAKAL	146
RUNGKUT	247
SAMBIKREP	132
SAWAHAN	287
SEMAMPUR	201
SIMOKERTO	132
SUKOLO	286
SUKOMANUNGGAL	130
TAMBAKSARI	294
TANDES	198
TEGALSARI	212
TENGGILIS MEJOYO	85
WIYUNG	137
WONOCOLO	177
WONOKROMO	364
	5544

\*) data pertanggal 19 Desember 2022

Melihat data di atas dan banyaknya UMKM yang ada di Kota Surabaya yaitu 60.007<sup>111</sup>, maka masih sekitar 10% UMKM yang diberdayakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan kalau berbicara mengenai keberhasilan dari program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berikut penjelasan dari Dinas

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

<sup>110</sup> Dokumentasi Diskoperindag Kota Surabaya

<sup>111</sup> <https://www.surabaya.go.id/id/berita/60749/umkm-surabaya-capai-60-ribu-leb>

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yang mengatakan bahwa:

“Berbicara keberhasilan berkaitan dengan omset itu belum bisa memastikan karena hal tersebut fluktuatif, kalau berkaitan dengan berdaya guna atau berdaya saing masuk di Dinkopdag posisi nol namun ketika keluar dia sudah punya sertifikasi halal misalnya artinya hal tersebut sudah diberdayakan”<sup>112</sup>

Selanjutnya ada pendapat DPRD Kota Surabaya mengenai keberhasilan dari program pemberdayaan UMKM, yang mengatakan bahwa:

“Belum mencapai target yang diinginkan, belum semua UMKM dapat tercover oleh pemerintah. Saat ini jumlah UMKM yang diberdayakan kurang dari 10.000. Karena melihat program ini masih baru dilakukan setelah redanya pandemi Covid-19.”<sup>113</sup>

Selanjutnya pandangan dari partai politik Kota Surabaya mengenai keberhasilan dari program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pertama ada PDIP yang mengatakan bahwa:

“Sudah berjalan on the track, cuma beberapa perlu dilakukan revitalisasi SWK. Perlu adanya inovasi seiring dengan perkembangan jaman, melihat sekarang masyarakat yang dirumah saja tapi pengen makanannya datang, inovasi itu yg sekarang terus dikejar, kalau sekarang gaya masyarakatnya pasca pandemi itu maka harus dialihkan seperti apa fungsi SWK itu, sebagai sentra ekonomi yang bagaimana, nah ini yang sedang dirumuskan bagaimana bisa nanti seiring dengan perkembangan jaman, jadi yang masih kurang diantaranya SWK itu karena pasca pandemi ini merubah pola hidup warga makanya perlu inovasi. Kalau E-peken sendiri sudah berhasil karena perputaran uangnya puluhan miliar dari E-peken, namun masih perlu sosialisasi karena masyarakat belum banyak yang mengenal”<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tatik Lely Juwita, S.E (Sub Koor Dinator Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro) pada tanggal 29 November 2022 pukul 10.45 WIB di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Luthfiah (Ketua komisi B DPRD Surabaya) pada tanggal 22 November 2022 pukul 14.06 WIB di Kantor DPRD Kota Surabaya.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Hidayat, S.Sos. (Wakil Sekretaris Bidang Program PDI Perjuangan Kota Surabaya) pada tanggal 25 November 2022 pukul 13.52 WIB di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.



Kedua, ada PSI yang berpendapat bahwa:

“So far so good, kenapa karena UMKM tidak butuh permodalan dan pemasaran aja tetapi mereka juga butuh kepastian usaha seperti perizinan yang sekarang sudah sangat mudah, sekarang semuanya online cuma bayar 50 ribu bisa bikin PT, CV, UD. So far so good, E-peken itu memang belum sempurna tapi niatnya untuk go digital sudah bagus, walaupun niatnya ini harusnya dibelokkan ke arah yang lebih besar lagi, kurang dipemasaran aja”<sup>115</sup>

Ketiga, ada pandangan Gerindra mengenai keberhasilan UMKM yang mengatakan bahwa:

“MBR Surabaya sekarang satu jutu seratus ribu lebih dengan masyarakat yang 3jt lebih brtt 30% orang surabaya miskin, terus berhasilnya dimana? Kalau sukseskan ketika kemiskinan, MBR, sedikit misal 5% kalau 30% apanya yang sukses, berartikan masalah di kota surabaya ini lapangan pekerjaan tidak ada, orang cari kerja sulit, suksesnya dimana”<sup>116</sup>

Keempat, pandangan PKB mengenai keberhasilan dari program pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya ini, yaitu:

“Idenyalnya memang oke, cuma tidak semua programnya berjalan mulus, ada yang berhasil ada yang belum, menurut saya E-Peken itu tidak berhasil. Belum optimal, dikatakan tidak berhasil cuma kan masih jalan, nilainya masih 6, kalau orang sekolah itu cuma lulus aja tidak baik”<sup>117</sup>

Kelima, ada pandangan dari PKS yang mengatakan bahwa:

“Surabaya memang salah satu kota terkaya dan banyak fasilitas, tapi seiring dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit jadi memang pendapatan daerah besar tapi jumlah penduduk juga besar yang itu adalah sebuah tantangan, maka kalau minta harus selesai setahun dua tahun itu mungkin itu terlalu berat. Harapan kita tentu prioritas, mendasar, dan substansial, jadi kita tidak menginginkan beliau

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yuga Pratisabda Widyawasta, S.T. (Sekretaris DPD PSI Kota Surabaya) pada tanggal 24 November 2022 pukul 12.45 WIB di Kantor DPD PSI Kota Surabaya.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Alim, M.Pd.I. (Wakil Ketua DPC Gerindra Kota Surabaya) pada tanggal 25 November 2022 pukul 16.12 WIB di Kantor DPRD Kota Surabaya.

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Musyafak Rouf, MH. (Ketua DPC PKB Kota Surabaya) pada tanggal 28 November 2022 pukul 15.51 WIB di Kantor DPC PKB Kota Surabaya

memaksakan diri bahwa semuanya akan selesai sehingga kalau dipaksakan nanti takutnya terkesan ceremonial. Jadi memang itu tidak bisa sekali jadi, jadi kalau dimisal dipatok ditahun ini MBR dari sekian menjadi sekian karena itu proses yang harus dilampai panjang jadi gak tiba-tiba yang namanya UMKM pendapatan bertambah dan stabil gak seperti itu, memang harus berani dan mengankui memang ada langkah panjang yang harus ditempuh yang itu tidak bisa dipanen seketika.”<sup>118</sup>

Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya belum berhasil masih banyak hal yang harus di perbaiki. Masih terdapat beberapa catatan kritis yang diungkapkan oleh partai politik, sistem itu belum linier dengan program yang lain, contohnya e-peken, dimana pembelinya adalah pegawai negeri sementara pegawai negerinya tidak semua berdomilisi Surabaya, namun penyediannya barangnya hanya ada di beberapa kelurahan di Surabaya. Lokasi SWK yang perlu diperhatikan akan agar lebih strategis. Pelatihan yang dilakukan harus lebih substantif dan berdampak kepada masyarakat, tidak hanya sekedar formalitas saja.

Penulis melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang ikut dalam program pemberdayaan UMKM dan pelaku mengaku cukup puas dengan adanya program tersebut, mereka difasilitasi tempat berjualan yang membuat mereka nyaman untuk, ada juga dari mereka yang sering diikutkan event, difasilitasi pelatihan. Sedangkan pandangan akademisi terkait program pemberdayaan UMKM Pemerintah Kota Surabaya, yaitu:

“Tidak ada gading yang tidak retak sesempurna apaun program itu pasti memiliki celah dan kritik dari partai yang lain itu adalah

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Fahrudin, ST (Bendahara DPD PKS Kota Surabaya) pada tanggal 9 Desember 2022 pukul 13.47 WIB di Kediaman Bapak Arif Fahrudin, ST.

sebagai salah satu wahana agar program ini tetap berlangsung lebih baik, artinya kritik partai lain itu sebagai penyeimbang dan pengontrol agar program yang dijalankan itu sesuai dengan relnya”.<sup>119</sup>

Menganai pengaruh program pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya, semua informan mulai dari DPRD Kota Surabaya, partai politik yang mendukung Eri dalam Pilwali 2020, sampai dengan partai politik yang tidak mendukung Eri dalam Pilwali 2020, berpendapat bahwa program tersebut sedikit banyak membawa pengaruh terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya. Informan melihat bahwa Surabaya mampu survive dalam pandemi Covid-19, APBD Surabaya tahun 2023 juga meningkat, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada November 2022 7,2% diatas pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, perputaran uang di Kota Surabaya juga besar. Adapun pandangan akademisi mengenai pengaruh program pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya, yang mengatakan bahwa:

“Otomatis iya, karena kalau saya tidak salah membaca data itu sekitar 40% perekonomian Surabaya itu ditopang oleh ekonomi informal itu tadi, entah itu berbentuk warung kelontong, usaha kecil itu banyak ditopang oleh kelompok informal itu tadi. Kenaikan UMKM dan pengaruhnya terhadap PAD tidak banyak, tapi kalau pengaruh pemberdayaan UMKM terhadap GDP pemkot Surabaya berpengaruh, tapi kalau terhadap PAD tidak banyak. Pembangunan ekonomi berhasil atau tidak itu yang pasti mampu memberikan jaminan kepada usaha kecil untuk bisa hidup lebih layak, intinya pokok bisa menghasilkan incom kepada UMKM intinya sederhananya Cuma itu, yang kedua adalah usahanya tetep berlanjut. Kalau angka kemiskinan seharusnya lebih baik kalau kalau tidak ada

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD (Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.09 WIB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Covid-19, tapi Covid-19 ini menjadikan semua bermasalah, covid ini sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan”<sup>120</sup>

Melihat pernyataan akademisi yang mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari kemampuan memberikan jaminan kepada usaha kecil untuk bisa hidup lebih layak, bisa menghasilkan incom kepada UMKM, serta keberlanjutan usaha dari UMKM. Maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan bagaimana dampak program pemberdayaan UMKM terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Penulis telah melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang ikut dalam program pemberdayaan tersebut, pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya program pemberdayaan UMKM tersebut.

Pertama, Ibu Hofifah yang merupakan penjual makanan dan minuman di SWK Taman Prestasi yang dulu mengalami penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh pemerintah Kota Surabaya, menurut Ibu Hofifah pembeli di SWK lebih ramai dibandingkan sebelum ia berada di SWK, Ibu Hofifah bisa mendapatkan omset kurang lebih sebesar 3jt/bulan, Ibu Hofifah juga mengatakan bahwa dengan adanya SWK dapat membatu perekonomian keluarganya.<sup>121</sup>

Kedua, Ibu Hasibah merupakan UMKM di bidang fashion khususnya batik yang memasarkan produknya di sentra UMKM Pemerintah Kota Surabaya. Ibu Hasibah mengatakan bahwa ia sering kali mengikuti

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD (Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.09 WIB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hofifah (Pelaku UMKMK) pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 12.32 WIB di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Taman Prestasi.

event dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ibu Hasibah merasakan perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti program pemberdayaan UMKM menurut Ibu Hasibah dengan mengikuti program pemberdayaan UMKM produknya lebih dikenal banyak orang, sehingga omsetnya juga bertambah kalau dulu hanya bisa 300rb/bulan sekarang bisa 8jt/bulan. Ibu Hasibah juga mengatakan bahwa program ini membawa berpengaruh terhadap perekonomiannya, yang dulu hanya bergantung kepada suaminya, sekarang bisa punya penghasilan sendiri dan bisa bantu suami.<sup>122</sup>

Ketiga, Ibu Ainurrohma merupakan UMKM di handycraft khususnya yang memasarkan produknya di sentra UMKM Pemerintah Kota Surabaya. Ibu Ainurrohma juga mengaku sudah beberapa kali mengikuti pelatihan yang membuat skillnya bertambah, perubahan yang dirasakan oleh Ibu Ainurrohma dengan adanya program tersebut ia mengatakan bahwa sekarang produknya banyak yang kenal, sehingga omsetnya juga bertambah dari yang dulu hanya 750rb/bulan dengan mengikuti program pemberdayaan UMKM bertambah menjadi 1-2jt/bulan.<sup>123</sup>

Zulfi Syarif Koto mendefinisikan politik pembangunan sebagai sebuah cara atau strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan transformasi sosial ke arah yang lebih baik yang

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hasibah (Pelaku UMKMK) pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 11.15 WIB di Kediaman Ibu Hasibah.

<sup>123</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ainurrohma (Pelaku UMKMK) pada tanggal 1 Desember 2022 pukul 12.14 WIB di kediaman Ibu Ainurrohma.

berlandaskan pada nilai-nilai yang digunakan dalam suatu negara. Hasil. Melihat program pemberdayaan UMKM yang berdampak terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya maka pembangunan yang dilakukan oleh Eri Cahyadi berhasil transformasi sosial ke arah yang lebih baik.

Seperti yang dijelaskan pada bagian teori bahwa pembangunan dalam proses-proses politik yang dilakukan untuk melegitimasi program atau tujuan pembangunan agar pembangunan itu dapat memperkuat atau mendapat dukungan sehingga kekuasaan dapat terus dipegang dengan cara atau strategi-strategi tertentu. Dengan melihat dampak dari program pemberdayaan UMKM terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya, seperti yang banyak dikatakan oleh partai politik bahwa nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat elektabilitas Eri Cahyadi, ketika tingkat elektabilitasnya tinggi maka jika Eri mencalonkan lagi pada periode selanjutnya, akan dengan mudah Eri Cahyadi mendapatkan suara untuk melanjutkan kekuasaannya. Adapun pandangan dari Akademisi terkait hal tersebut, yaitu:

“Surabaya itu unik karena elektoral di Pilwali lebih independen dibandingkan kabupaten yang lain yang cenderung dipengaruhi money politik. Jadi saya kira di Surabaya kalau itu tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan saya kira tidak, dia lebih mengarah bagaimana programnya dapat memberi manfaat kepada Kota Surabaya. Kalau dia mau melanggengkan kekuasaan itu belum terindikasi ya, tapi kalau umpunya itu untuk dominasi partai tertentu mungkin iya, surabaya sebagai tempat kelahiran Soekarno seolah-olah menjadi identik bahwa PDI harus menang disini ketika PDIP harus menang disini maka pimpinan partai itu menunjuk orang-orang birokrat yang pro rakyat yang disukai rakyat yang populer yang ditunjuk menjadi calon kepala daerah dan itu ya proses melanggengkan kekuasaan kelompok atau partai politik tertentu. Tapi kalau itu untuk melanggengkan satu dinasti tertentu itu belum,

ini lebih mengarah kepada seseorang yang profesional yang mampu untuk mengubah harapan hidup dan kehidupan di Kota Surabaya. Lima ribu bukan angka yang kecil untuk ukuran Surabaya dan itu bisa dieskalasi di periode berikutnya di 3,5 tahun pemerintahan beliau ini kayaknya beliau harus sukses untuk periode berikutnya, jadi kalau melihat untuk tahap pertama satu tahun ini saya kira sudah oke.”<sup>124</sup>

Melihat hasil yang sudah dijelaskan dan alasan Eri melakukan pembangunan yang sudah disampaikan di bagian isu pembangunan dimana pembangunan yang dilakukan adalah keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya maka peneliti mengungkapkan bahwa motif pembangunan Eri Cahyadi adalah kekuasaan, bukan hanya kekuasaan pribadi namun juga kelompoknya. Motif politik pembangunan merupakan sebuah keinginan yang diinginkan oleh aktor dalam pembangunan. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh aktor sudah pasti berisi kekuasaan, dengan cara apa pun itu. Pencapaian ekonomi dari pembangunan suatu negara sebenarnya bermotifkan kekuasaan, jika ekonomi membaik yang dijalankan oleh aktor membaik, maka aktor bisa terus didukung oleh masyarakat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>124</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA, PhD (Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam) pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.09 WIB di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya yang memiliki kekuasaan menjadi peran sentral dalam politik pembangunan Kota Surabaya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui pemberdayaan UMKM merupakan keberlanjutan dari tahap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Sedangkan ideologi Eri Cahyadi adalah Pancasila yang didalamnya terdapat kerakyatan, maka tujuan yang diharapkan dari program pemberdayaan UMKM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun strategi pembangunan melalui program pemberdayaan UMKM dilakukan dengan cara fasilitasi secara bertahap, ada berbagai macam fasilitasi yang diberikan dalam program pemberdayaan UMKM diantaranya pemasaran, pelatihan, permodalan, perizinan. Program pemberdayaan UMKM dilakukan secara demokratis yang dimana program tersebut bersentuhan langsung dengan sektor masyarakat dan memberikan peluang partisipatif yang lebih luas bagi masyarakat dengan keterbukaan, kemudahan, dan akuntabilitas. Adapun strategi pembangunan yang dilakukan Eri menggunakan pendekatan campuran, sesuai dengan program pemberdayaan UMKM yang merupakan program inisiatif pemerintah kota Surabaya agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki, serta masyarakat yang dapat mengontol program ini. Sehingga program pemberdayaan UMKM telah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha mikro dengan jumlah 5544, dan berdampak terhadap pembangunan ekonomi dimana Kota Surabaya



mampu survive dalam pandemi Covid-19, APBD Surabaya tahun 2023 juga meningkat, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada November 2022 7,2% diatas pertumbuhan ekonomi tingkat nasional, perputaran uang di Kota Surabaya juga besar, serta yang tidak kalah penting membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Melihat hasil yang sudah dijelaskan dan alasan Eri melakukan pembangunan, maka penulis mengungkapkan bahwa motif pembangunan Eri Cahyadi adalah kekuasaan, bukan hanya kekuasaan pribadi namun juga kelompoknya.

## **B. Saran**

Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Eri Cahyadi sedikit banyak sudah memberi dampak terhadap pembangunan ekonomi Kota Surabaya, namun keberhasilan tersebut masih perlu banyak sekali catatan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Kota Surabaya. Maka saran penulis kedepannya Eri Cahyadi harus tetap meperhatikan kritik dari partai politik dan pihak terkait agar pembangunan yang dilakukan mendapatkan hasil yang maksimal.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, Awaluddin -. “Mengapa Pendidikan Politik Elektoral Penting ? Respon Penyelenggaraan Pemilu 2019.” *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala* 4, no. 4 (2019): 112.
- Definta Aliffiana, Nina Widowati. “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Sentra Industri Konveksi Dan Bordir Di Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1693.
- Dian Prihardini Wibawa, Maya Yusnita. “Peran UMKM Sebagai Penyangga Perekonomian Berbasis Kerakyatan.” *Jurnal Penelitian Manajemen Holistik* 2, no. 2 (2019): 3.
- Fadli, Muhammad, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, and Achmad Zulfikar. “Keterlibatan Elit Lokal Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015.” *Aristo* 6, no. 2 (2018).
- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021):40.
- Fidela, Alifah, Aprinaldi Pratama, and Tita Nursyamsiah. “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya Di Desa Jambu , Kabupaten Sumedang.” *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* 2, no. 3 (2020): 494.
- Firstyananda, Esprita Novry, Khairunnisa Putri Rahma, and Susi Hardjati. “Program Kemitraan Upaya Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus : PT. Jasa Marga Surabaya Gempol).” *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 11, no. 1 (2021): 47.
- Fokatea, Fitri Aprillia, and Wawan Mas’udi. “Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus Di Kabupaten Kepulauan Sula.” *Journal of Governance and Social Policy* 1, no. 2 (2020).
- Gusti, Achmad Mahargya Ridhaning, And Program. “Perilaku Pemilih Pemula Dalam Merespon Wacana Risma Effect Pada Pilkada Surabaya 2020.” *Jurnal Template* 10, No. 1 (2021): 2.
- H.Afifuddin, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Hannan, Abd., and Fithriyah Rahmawati. “Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Pamekasan Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal.” *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2020).

- Hariyoko, Yusuf. "Pengembangan UMKM Di Kabupaten Tuban." *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 4, no. 1 (2018): 1012.
- Hartati, Ita. "Strategi Pembangunan Sdm Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Era Disrupsi 4.0." *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 13, no. 1 (2020): 114.
- Hasnati, Sandra Dewi, and Andrew Shandy Utama. "Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah ( UMKM ) Di Kelurahan Limbung Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Umkm Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro , Kecil Dan M." *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan* 5, no. 2 (2021): 178.
- Hasnu, Firdaus Syam, "Ideologi Dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme PDIP Dan Islam Moderat PKB," *Syntax Idea* 3, no. 7 (2021): 1626.
- Hayat Hidayat Turohman, Slamet, and Yaqub Cikusin. "Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Berbasis Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa." *Jurnal Transformasi Administrasi* 8, no. 2 (2018).
- <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/pertumbuhan-ekonomi-di-surabaya-alami-kontraksi-di-angka-4-85-persen>.
- <https://nasional.tempo.co/read/253464/kpu-tetapkan-risma-sebagai-walikota-surabaya-terpilih>.
- <https://news.detik.com/berita/d-3094354/data-kpu-risma-whisnu-menang-pilkada-surabaya-raih-8622-persen-suara>.
- <https://www.surabaya.go.id/id/berita/60749/umkm-surabaya-capai-60-ribu-leb>
- Idayu, Riyanthi, Mohamad Husni, and Suhandi Suhandi. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 7, no. 1 (2021): 74.
- Islamiyati, Islamiyati and Dewi Hendrawati. "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review* 2, no. 1 (2019): 106.
- Juliansyah, Eris. "Strategi Pengembangan Sumber Daya Perusahaan Dalam Meningkatkan Kinerja PDAM Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Ekonomak* 3, no. 2 (2017): 19.
- Kusmanto, Heri, and Warjio Warjio. "Politik Pembangunan Organisasi

- Kemasyarakatan Islam Indonesia – Malaysia.” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 184.
- Mauliddah, Nurullaili. “Disparitas Pendapatan Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kota Surabaya.” *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS DHARMA ANDALAS* 22, no. 1 (2020): 326.
- Muhammad Rizky Rahmanda. “Strategi Digital Marketing Politik Tim Sukses Eri.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Muqorrobin, Moh, and Ady Soejoto. “Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5, no. 3 (2017): 6.
- Nurdina, Mutiara Rachma Ardhiani, Christina Menuk Sri Handayani, and Fachrudny Asj’ari. “Strategi Pemberdayaan UMKM Makanan Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Slempit Kedamean Gresik.” *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 46.
- Pambudi, Helmi Dwi Agung, and Nia Kurniasari. “Pengaruh Politik Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota* 1, no. 2 (2021).
- Purwasito, Andrik. *Pengantar Studi Politik*. Surakarta: UNS Press, 2011.
- Rahmat, Bai. “Elite Penentu Dalam Politik Lokal ( Studi Kasus Peran Ulama Terhadap Pemenangan Sofyan Caleg Dapil I Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014).” *Jom Fisip* 4, no. 2 (2017).
- Ratnasari, Puput. “Politik Pembangunan Di Kota Palangkaraya Menuju Smart City Kota Palangkaraya.” *Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 12 (2020).
- Renja Diskoperindag Kota Surabaya Tahun 2022
- Renstra Diskoperindag Kota Surabaya 2021-2026
- Rasyid, Abd. *Politik Sosial Dan Kepemimpinan Wanita*. Ponorogo: Wade Group, 2017.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*. Jambi: PUSAKA JAMBI, 2017.
- Sarfiah, Sudati, Hanung Atmaja, and Dian Verawati. “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019): 143.

- Selly Febriana, Herman Cahyo Diartho, Nanik Istiyani. "Hubungan Pembangunan Ekonomi Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 2 (2019): 60.
- Shodiq, Ja'far. "Persinggungan Konsep Pemilu Di Indonesia Dengan Pemikiran Politik Dalam Islam." *Ekp* 9, no. 2 (2021): 41.
- Siregar, Burhanuddin, Heri Kusmanto, and Warjio Warjio. "Politik Pembangunan Organisasi Himpunan Keluarga Besar Mandailing 'HIKMA' Di Sumatera Utara." *Perspektif* 9, no. 2 (2020): 286.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing*, 2015.
- Styaningrum, Farida. "Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Pemberdayaan Umkm Indonesia." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 10, no. 8 (2021): 658.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sulaeman, Moh. Muklis. "Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan UMKM Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan." *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 01 (2019): 17.
- Sunariani, Ni Nyoman, Aan. Oka Suryadinata, and Ida Idm Rai Mahaputra. "Pemberdayaan Usaha Mikro Kcil Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan Di Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 3.
- Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- Ulfa, Mau Lida, Heri Kusmanto, and Warjio Warjio. "Politik Pembangunan Wisata Halal Di Kota Sabang." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 9, no. 1 (2019).
- Ulfa, Sholihatus, and Warsono. "Strategi Calon Walikota Surabaya 2020 Eri Cahyadi Dan Armuji Dalam Memenangkan Pilwali Di Surabaya." *Kajian Moral dan Kewarganegaraan* 10, no. 3 (2022): 492–507.
- Ulfah, Irma Fitriana, Andi Setiawan, and Alfiyatur Rahmawati. "Pembangunan Desa Berbasis Potensi Lokal Agrowisata Di Desa Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, no. 1 (2017).

- Wahed, Mohammad. "Pemetaan Potensi Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 3, no. 1 (2020): 62.
- Wardhana, Febrianto Wisnu. "Politik Pembangunan Di Perdesaan." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 15, no. 1 (2017).
- Warjio. *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, Dan Ideologi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Widhagdha, Miftah Faridl, and Suryo Ediyono. "Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia." *Journal of Social Responsibility Review* 1, no. 1 (2022): 72.
- Yusniyawati, Elis, and Redi Panuju. "Karakteristik Ekspektasi Generasi Milenial Calon Walikota Surabaya 2020-2025: Peduli Dan Merakyat." *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2020): 17.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A